

**PEMBIAYAAN KAMPANYE POLITIK CALEG PARTAI PADA
PEMILU 2024 DI JAWA TENGAH :**

STUDI KASUS PPP DAN PKS

Program Sarjana (S1) Jurusan
Ilmu Politik



Oleh :

Iik Hikmahwati

2106016023

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lam : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Iik Hikmahwati

NIM : 2106016023

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Pembiayaan Kampanye Politik Caleg Partai Islam Pada Pemilu 2024 di Jawa

Tengah: Studi Kasus PPP dan PKS

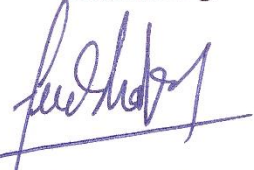
Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 17 Maret 2025

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

NIP.19851118201601190

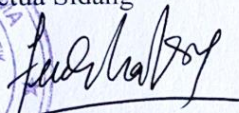
**PENGESAHAN SKRIPSI
PEMBIAYAYAAN KAMPANYE POLITIK CALEG PARTAI PADA PEMILU 2024
DI JAWA TENGAH :
STUDI KASUS PPP DAN PKS**

Disusun Oleh

Iik Hikmahwati

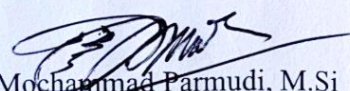
NIM.2106016023

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 27 Maret 2025 dan telah
dinyatakan
LULUS.

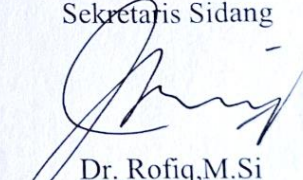
Susunan Dewan Penguji
Ketua Sidang

Mohammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182023211019



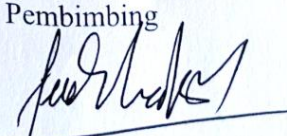
Penguji Utama


Dr. H. Mochammad Parmudi, M.Si
NIP. 196904252000031001

Sekretaris Sidang


Dr. Rofiq, M.Si
NIP. 197303052023211007

Pembimbing


Mohammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182023211019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Iik Hikmahwati, menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *“Pembiayaan Kampanye Politik Caleg Partai pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah: Studi Kasus PPP dan PKS”* merupakan hasil karya penulis saya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Semua pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya di jelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur plagiarisme di dalam tulisan seperti ini, saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 15 Maret 2025

nyatakan,



Iik Hikmahwati

2106016023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Pembiayaan Kampanye Politik Caleg Partai Pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah: Studi Kasus PPP dan PKS”*** tanpasuatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syaf'atnya di hari kiamat.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran penulis selama berkuliah di FISIP UIN Walisongo Semarang dan di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Nregeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh Pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
3. Kepala Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.
4. Kepada dosen pembimbing saya yakni, Bapak Muhammad mahsun, M.A. yang telah membimbing serta telah memberikan segala ilmu maupun pengalaman yang telah diberikan dalam bimbingan,saran maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi yang penulis lakukan.

6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Sukarman yang selalu mengusahakan, mendidik, memberi motivasi maupun pencerahan dan memberikan apapun itu untuk anaknya dapat berdiri di dunia perkuliahan, dan tentunya menjadi sosok pahlawan sekaligus peran seorang ayah yang tidak ada hentinya lelah dalam mengusahakan untuk anaknya agar menjadi sosok yang berhasil sekaligus sosok seorang laki-laki yang menjadi cerminan nanti di masa depan yang selalu mengusahakan dan memulai anaknya maupun keluarganya tanpa rasa mengeluh sedikitpun. Dan Ibu Siti Robingah yang tak henti-hentinya mendoakan untuk kesehatan, keselamatan, kesuksesan dan segala-galanya untuk anaknya sekaligus teman curhat, cerita keluh kesah dan kebahagiaan, serta memberikan dukungan, sehingga menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada kakak saya tercinta Sukma Aditya Rahtomo, yang telah membimbing saya, memberikan motivasi, mendukung segala proses kesulitan yang dihadapi penulis dan mengajarkan hal-hal baik sehingga saya bisa di titik saat ini.
9. Kepada teman tercinta Linda Avika dan Amaliyah Nur Safitri yang telah memberikan motivasi penulis mendengarkan keluh kesah, kebahagiaan maupun kesedihan yang sudah saya anggap kakak sendiri, saling bertukar cerita dari kisah hidupnya dan kenyataannya sehingga sampai di titik ini.
10. Kepada teman kontrakan pelangi yang sudah penulis anggap sebagai keluarga adik, kakak sendiri di perantauan. Khusnul Khotimah, Septy Aisyah, Fara Itna Farokhah, Rizki Nur Alifah, dan Fiki Mursida yang selalu menghibur penulis dalam keadaan apapun, dan selalu memberikan semangat kepada penulis pada saat penulis sedang di titik terendah sehingga penulis mendapatkan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan sekaligus keluarga yaitu yudha 45 yang saya sayangi seperti keluarga sendiri dan terima kasih sudah mengajarkan banyak pengalaman, motivasi, semangat dari maba sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih untuk semuanya atas kebaikan

dan keikhlasannya. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan Syukur, penulis ucapkan terima kasih.

13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Iik Hikmahwati. Saya aspirasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih selalu bisa kuat dalam melewati hari-hari di dunia perkuliahan yang jauh dari orang tua, walaupun pernah mengeluh dalam menjalani segala hal dan terima kasih bisa sejauh ini dan menyelesaikan tanggung jawabnya, orang tua berpesan” jika itu pilihanmu maka tuntaskan dengan tanggung jawabmu” maka dari itu saya selalu mengingat didalam pikiran saya. Namun, disini lain saya ucapkan terima kasih sudah bisa sabar, tabah dalam menjalankan semua ujian serta cobaan yang telah dilalui, mungkin saya bukan orang yang sempurna di mata orang lain tetapi saya selalu bersyukur atas nikmat, ujian yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana kalo tidak ada ujian mungkin penulis tidak bisa belajar untuk kedepanya menjadi lebih baik lagi dan tidak akan sekuat ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini , kesempurnaan dibentuk bukan mencari kesempurnaan pada orang lain. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi dan telah menyelesaikan sebaik-baiknya. Pencapaian ini perlu dirayakan untuk diri saya sendiri, apapun kekurangan maupun kelebihanmu maka rayakan dengan bahagia dan jangan lupa bersyukur masih banyak orang-orang yang menginginkan di posisimu saat ini.

Akhir kata, semoga laporan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan ke depannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Maret 2025

Penulis

Iik Hikmahwati

NIM.2106016023

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Dengan segala syukur dipanjatkan pada Allah SWT Tuhan semesta alam dan tidak ada yang mampu menandingi kekuatan serta kekuasaanya. Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Sukarman dan Ibu Siti Robingah yang telah berjuang keras untuk membiayai anaknya kuliah serta menjadi panutan dan penyemangat saya dalam suatu proses apapun dan tidak pernah berhenti dalam memanjatkan doa-doa yang terbaik untuk anaknya, dan tidak lupa Kakak saya Sukma Aditya Rahtomo yang sudah memberi motivasi dan arahan kepada adeknya tercinta ini. Untuk dosen pembimbing Bapak Muhammad Mahsun yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan serta motivasi yang tiada hentinya untuk menjadikan seorang akademisi yang hebat seperti beliau. Dan untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang yang sudah menjadi tempat bagi saya untuk belajar dan akan menjadi pegangan kesuksesan dimasa depan nantinya.

MOTTO

“ Terlambat Bukan Berarti Gagal. Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik kata Proses yang kamu anggap Rumit”

(Edward Satria)

ABSTRAK

Kampanye merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pemilu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye, uang memiliki peran penting di dalamnya, terutama dalam konteks Pemilihan Umum di Indonesia khususnya pembiayaan kampanye politik caleg partai Islam pada pemilu 2024 di Jawa Tengah PPP dan PKS. Dengan demikian, uang merupakan komponen paling penting dalam kampanye politik dan menentukan sukses tidaknya kandidat dalam memenangkan kontestasi merebut jabatan publik mulai dari pimpinan eksekutif atau kepala daerah, presiden maupun anggota parlemen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan 6 anggota DPRD Jawa Tengah, dari masing-masing partai 3 anggota. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat eksploratif dengan instrumen utama yang harus memiliki pengetahuan luas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengandalkan informasi diperoleh langsung dari responden dan informan. Informan ini dikumpulkan oleh beberapa instrumen pengumpulan data dengan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan kampanye para kandidat legislatif di Jawa Tengah pada pemilu 2024 semakin mahal dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagian besar kandidat yang serius ingin merebutkan kursi untuk dapat memenangkan kursi DPRD Jawa Tengah, para kandidat banyak yang menggunakan uang untuk mempengaruhi suaranya. Namun, para kandidat mengatakan untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan, kesehatan, dan sembako. Maka dari itu seperti tidak terlihat menggunakan uang untuk memberikan suatu untuk masyarakat yang dibutuhkan di masing-masing dapil tersebut. Dan pembiayaan kampanye politik dari penelitian saya yaitu partai Islam PPP dan PKS DI Jawa tengah pada pemilu 2024 dilihat dari profil pendana yang saya teliti lebih dominan menggunakan dana pribadi atau pasangan kandidat.

Kata Kunci : Pembiayaan Kampanye, Partai Politik, Pemilu

Abstract

Campaigning is one of the most important parts of the election process. However, it cannot be denied that in the campaign process, money plays an important role in it, especially in the context of the General Election in Indonesia, especially the financing of political campaigns of Islamic party legislative candidates in the 2024 election in Central Java, PPP and PKS. Thus, money is the most important component in a political campaign and determines the success or failure of candidates in winning the contest to seize public office, starting from executive leaders or regional heads, presidents and members of parliament.

This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through direct interviews with 6 members of the Central Java DPRD, from each party 3 members. This research was conducted in natural conditions and was exploratory in nature with the main instrument that must have extensive knowledge. This type of research is field research that relies on information obtained directly from respondents and informants. These informants were collected by several data collection instruments with interviews.

The results of this study indicate that campaign financing for legislative candidates in Central Java in the 2024 election is increasingly expensive compared to previous elections. Most of the candidates who are serious about winning seats in the Central Java DPRD, many candidates use money to influence their votes. However, the candidates say it is for community needs such as development, health, and basic necessities. Therefore, it seems that they do not use money to provide something for the community that is needed in each electoral district. And the financing of political campaigns from my research, namely the Islamic parties PPP and PKS in Central Java in the 2024 election, seen from the funding profile that I studied, is more dominant in using personal funds or candidate pairs.

Keywords: Campaign Financing, Political Parties, Elections

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. PERTANYAAN PENELITIAN	4
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. TINJAUAN PUSTAKA	6
F. METODE PENELITIAN	15
G. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II	
EKONOMI POLITIK MARXIAN	20
A. Definisi Konseptual.....	20
B. Kerangka Teori : Ekonomi Politik	22
BAB III	28
LANDSCAPE JAWA TENGAH	28
A. Kondisi Geografis dan Demografis Jawa Tengah.....	28
B. Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Tengah.....	32
C. Struktur Politik di Jawa Tengah	39
BAB IV	42
PROFIL KANDIDAT PPP DAN PKS	42

(ANGGOTA DPRD JAWA TENGAH)	42
A. Profil Partai Persatuan Pembangunan	42
B. Profil Partai Keadilan Sejarah	49
C. Profil Kandidat DPRD Jawa Tengah PPP	53
D. Profil Kandidat DPRD Jawa Tengah PKS	55
BAB V	
POLA PEMBIAYAAN KAMPANYE KANDIDAT PPP DAN PKS DALAM SEGI	
PENERIMAAN , PENGELOLAAN DAN PENGELUARAN	57
BAB VI	76
KONDISI PENENTUAN POLA PEMBIAYAAN DARI MASING-MASING KANDIDAT	76
BAB VII	80
PENUTUP	80
DAFTAR PUSTAKA	82
Dokumentasi	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Geografis	28
Gambar 3.2 Peta Wilayah Administrasi.....	29
3.3 Jumlah Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah.....	31
3.4 Produk Domestik Regional Bruto Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	33
3.5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Februari 2002-2024.....	35
3.6 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2024	36
3.7 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerja Utama.....	37
3.8 Karakteristik Pengangguran Februari 2022-2024.....	38
3.9 Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah di Pemilu 2004-2024.....	39
Gambar 4.1 Logo PPP.....	47
Gambar 4.2 Logo PKS.....	51
Gambar 5.1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PPP.....	58
Gambar 5.2 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PKS.....	61
Gambar 5.3 Sumber Pendanaan Kampanye.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pemilu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye, uang memiliki peran penting di dalamnya, terutama dalam konteks Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam berkampanye uang juga bisa di manfaatkan sebagai instrumen untuk membeli suara ataupun dukungan politik dari pemilih. Pembelian suara ini bisa dalam bentuk seperti membagikan uang tunai, sembako, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, uang sangat bermanfaat bagi kemenangan kandidat untuk membentuk jaringan tim sukses. Dengan demikian, uang merupakan komponen paling penting dalam kampanye politik dan menentukan sukses tidaknya kandidat dalam memenangkan kontestasi merebut jabatan publik mulai dari pimpinan eksekutif atau kepala daerah, presiden maupun anggota parlemen. Artinya, suksesnya pelaksanaan kampanye membutuhkan uang untuk membiayai pembentukan tim sukses dan kerja-kerja dalam mobilisasi suara, dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan kampanye politik untuk merebut jabatan politik tersebut (Khoiril, 2023).

Pentingnya peran uang dalam pembiayaan kampanye telah menarik sejumlah sarjana untuk mengkajinya. Beragam kajian telah menekankan pada persoalan strategi pemasaran dan sumber pembiayaan kampanye yang dilakukan oleh partai politik (Amir, 2023; Rizal, 2022; Evendi, 2020 ; Khoiril, 2023; Rian & Lia, 2020; dan Priyowidodo, 2018). Dalam kajian tersebut masih banyak yang membahas terkait strategi kemenangan dari pasangan calon legislatif dengan mengkaji setrategi politik kemenangan paslon dalam konsep partai politik, koalisi besar dan pemilu. Strategi kemenangan pasangan calon lembaga legislatif lebih membuat penguatan kampanye melewati jaringan kampanyenya ke plosok hingga pada promosi program politiknya yang membutuhkan biaya begitu besar. Pembiayaan kampanye tidak hanya mencakup sumber dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola, dialokasikan, dan digunakan untuk mempengaruhi pemilihan secara efektif.

Selain itu, pembiayaan kampanye belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada, masih banyak studi membahas terkait ketidaksesuaian pembiayaan kampanye dengan

peraturan yang berlaku. Masih banyak calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) dalam pembiayaan kampanye menggunakan dana pribadi (lihat Hermanto, 2020 ; Sina, 2020). Untuk melengkapi studi-studi sebelumnya mengkaji proses pembiayaan kampanye dengan mengambil kasus partai Islam, yaitu PPP dan PKS pada pemilu legislatif 2024 di Jawa Tengah.

Dari pembacaan sejumlah literatur sebelumnya, penulis berpandangan bahwa studi-studi yang ada belum banyak yang mengkaji bagaimana pembiayaan kampanye partai Islam dalam perhelatan pemilu legislatif di Indonesia. Pilihan pada PPP dan PKS ini didasarkan pada alasan-alasan akademik berikut. Pertama, PKS adalah partai yang dapat memperoleh suaranya dengan stabil di Jawa Tengah, pada tahun 2014 mendapatkan 6,90% selanjutnya pada tahun 2019 mendapatkan 8,42% dan pada tahun 2024 mendapatkan 8,26% suara atau 11 kursi lembaga legislatif di Jawa Tengah. Sedangkan PPP cenderung menurun dengan perolehan suara di Jawa Tengah pada tahun 2014 mendapatkan 6,60%, selanjutnya pada tahun 2019 mendapatkan 4,48% dan pada tahun 2024 mendapatkan 3,67% suara atau 6 kursi lembaga legislatif di Jawa Tengah. Kedua, PKS dan PPP adalah partai yang memiliki ideologi Islam dan berbasis Islam, hal ini berbeda dengan PKB dan PAN yang ideologi nya Pancasila yang basisnya pada Islam, partai Islam dalam kajian ini dipahami sebagai partai yang berideologi Islam dan basisnya memilih masyarakat yang beragama Islam.

Berdasarkan pertimbangan di atas dari kasus PPP dan PKS pada penelitian ini memfokuskan dua arena kajian. Pertama, studi ini menganalisis tentang perbedaan pola pembiayaan kampanye para caleg PPP dan PKS dalam segi penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran. Pola penerimaan bisa dianalisis dari sumber dana, transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing partai. Selanjutnya, dari segi pengelolaan bisa dianalisis dari struktur organisasi dan penggunaan teknologi dalam manajemen pembiayaan kampanye kandidat di PPP dan PKS (Wibowo, 2022). Kedua, menganalisis tentang kondisi seperti apa yang menentukan atau mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan para caleg PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah.

Dengan mengacu dua fokus kajian diatas, penulis dalam skripsi ini berargumen bahwa perbedaan pola pembiayaan kampanye anggota PPP dan PKS pada Pemilihan Umum legislatif 2024 di Jawa Tengah dibentuk sejumlah faktor. Pertama, dalam pola pembiayaan kampanye antara anggota PPP dan PKS dari masing-masing anggota. Yang di mana perbedaan ini yaitu terdapat dalam sumber pembiayaan kampanye, yang dilihat

oleh peneliti bahwa PPP dipandang sebagai partai dengan akar kuat dalam basis umat Islam dan politik tradisional, dari anggota PPP sendiri mengandalkan sumber yang lebih varikatif. Dana kampanye PPP dari masing-masing anggota sebagian besar dari dana pribadi anggotanya sendiri serta jaringan bisnis ataupun donatur yang sudah terjalin lama dengan masing-masing anggota legislatif tersebut. Pendekatan semacam ini sering kali melibatkan penggalangan dana yang lebih informal dan didorong oleh loyalitas pengusaha atau individu yang memiliki hubungan baik. Sedangkan dari anggota PKS sendiri lebih mengutamakan pembiayaan dari internal dan pendukung yang memiliki komitmen ideologis. Dari kampanye PKS peneliti melihat bahwa dalam hal ini pembiayaan PKS cenderung lebih terkendali dan sering kali menggunakan metode yang lebih terstruktur serta berbasis pada masing-masing anggota partai tersebut.

Adapun strategi penggunaan dana oleh 3 anggota dari masing-masing partai, yang di mana dari PPP sendiri telah mengalokasikan dana kegiatan kampanye yang bersifat langsung dan bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya, pemasangan baliho, rapat umum, dan pendistribusian alat peraga kampanye di area yang strategis. Sumber dana PPP juga digunakan untuk mendukung program sosial yang dapat menarik simpati masyarakat. Sedangkan dari PKS sendiri lebih fokus dalam pengorganisasian dan konsolidasi internal serta penggalangan massa melalui kegiatan yang berbasis pada komunitas. PKS sering menggunakan jaringan sosial yang kuat di tingkat bawah, seperti majelis taklim dan kegiatan keagamaan, untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye.

Selanjutnya, terkait dengan pola pembiayaan kampanye yang dilakukan kandidat PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan dan strategi pembiayaan yaitu terdapat basis pemilih dan demografi sosial. Pada PPP sebagai partai yang memiliki basis massa tradisional yang kuat dikalangan umat Islam, terutama kelompok-kelompok pesantren dan konservatif, kandidat PPP sering kali mengarahkan dana kampanye yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan keagamaan. Sedangkan dari masing-masing kandidat PKS berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis bahwasanya lebih mengandalkan basis pemilih yang lebih mengutamakan ideologi dan visi keagamaan serta kesejahteraan sosial. PKS lebih banyak mengalokasikan dana kampanye pada kegiatan sosialisasi berbasis komunitas seperti majelis taklim dan pelatihan kader.

Selain itu, untuk mengetahui kondisi apa saja yang telah menentukan pola pembiayaan yang dilakukan oleh kandidat dari masing-masing partai, bisa dilihat dari jaringan dan organisasi partai pada kondisi ekonomi, sumber daya finansial, regulasi, dan transparansi pembiayaan kampanye yang ada, meskipun dari PPP telah mengandalkan dukungan dari pengusaha dan tokoh masyarakat yang lebih besar, dengan pendekatan langsung kepada pemilih daerah. Sedangkan PKS lebih fokus pada pengelolaan dana yang terstruktur, berbasis pada jaringan kader dan simpatisan yang memiliki komitmen ideologis. Kedua partai ini dari masing-masing kandidat telah menyesuaikan pola pembiayaan mereka dengan kekuatan internal dan kebutuhan kampanye yang sesuai dengan konteks sosial di politik Jawa Tengah.

Dari argumen penelitian diatas akan dijelaskan lebih dalam detail pada pembahasan bab-bab berikutnya. Dengan demikian hasil penelitian ini akan memiliki sejumlah signifikansi. Pertama, studi ini memperkaya wawasan tentang studi-studi pembiayaan kampanye di Indonesia yang masih terbatas dalam konteks pembiayaan kampanye partai Islam di Indonesia. Kedua, studi ini menjadi referensi atau analisis terhadap fenomena empiris terkait pembiayaan kampanye di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Hal ini akan memperkaya berbagai kajian yang dilangsungkan oleh para peneliti sebelumnya sekaligus menjadi referensi penting bagi pengembangan ilmu politik di bidang kepartaian dan pemilu.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan yaitu :

Bagaimana pembiayaan yang dilakukan PPP dan PKS pada pemilihan umum legislatif 2024 di Jawa Tengah ?

1. Bagaimana perbedaan pola pembiayaan kampanye atau kandidat PPP dan PKS dalam segi penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran ?
2. Apa saja kondisi yang menentukan pola pembiayaan yang dilakukan kandidat PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berlandaskan permasalahan yang dirumuskan tersebut, terdapat susunan tujuan dari penelitian ini berupa ;

1. Untuk mengetahui serta memahami perbedaan pola pembiayaan kampanye atau kandidat PPP dan PKS dalam segi penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran.
2. Untuk mengetahui dan memahami pola pembiayaan yang dilakukan kandidat PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini tersusun atas dua jenis, yakni manfaat teoritis serta manfaat penelitian praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pada kajian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya pengetahuan akademisi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pembaca

Sebagai peningkatan pemahaman pembaca mengenai bagaimana pola pembiayaan kampanye politik partai islam PPP dan PKS pada pemilu legislatif 2024 di Jawa Tengah.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini menyediakan data empiris yang bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai pembiayaan kampanye partai Islam PPP dan PKS pada pemilu legislatif 2024 di Jawa Tengah dan bisa digunakan sebagai perbandingan dengan kasus-kasus serupa di daerah lain.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Banyak peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai dana kampanye di Indonesia. Berdasarkan literatur yang ada, kajian-kajian tersebut dapat dibagi menjadi tiga topik: pendanaan partai sebagai sebuah organisasi, pendanaan partai dalam pemilu daerah, dan pemilu. Peneliti mengkaji pola-pola dari penelitian sebelumnya dan menganalisis kebaruan penelitian tersebut. Di bawah ini yakni kajian pustaka atas penelitian ini:

1. Kajian Pembiayaan Partai Sebagai Organisasi

Kajian berkaitan dengan pembiayaan partai sebagai organisasi ini bersumber atas berbagai penelitian yang berkesamaan topik. Sebagai halnya yang sudah dilangsungkan (lihat Ganjar, 2017; Chandra dkk, 2021), para peneliti sebelumnya itu lebih banyak membuat pembahasan terkait organisasi partai Islam dan bantuan anggaran kampanye. Kajian berkaitan dengan partai Islam dilakukan oleh Ganjar (2017) yang menjelaskan jika partai Islam yakni organisasi politik yang bekerja pada sistem sosial yang berlangsung modernisasi. Chandra dkk. (2021) juga melakukan kajian berkaitan dengan partai politik yang dibagikan anggaran atas perbantuan oleh negara wajib bermanfaat guna masyarakat salah satunya yakni dimanfaatkan sebagai pendidikan politik.

Kajian yang pertama ditulis oleh Ganjar (2017) berjudul *Pragmatisme Partai Islam di Indonesia Pendekatan Tindakan Sosial* yang terbit pada Jurnal Departemen Ilmu Politik. Pada penelitian ini, fokus penelitian dalam kajian pertama terkait konseptual mengenai skema tindakan sosial guna menjumpai penjabaran berhubungan tindakan pragmatis atau pragmatisme, kedua membahas terkait karakteristik partai Islam guna lebih mengerti bagaimana skema tindakan sosial bisa diaplikasikan dalam partai Islam. Ketiga, membahas terkait kajian empiris yang menandakan dinamika partai Islam semasa berkiprah pada kompetisi demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, penulis berusaha mengkaji lebih dalam pendekatan terkait partai Islam pada kompetisi demokrasi di Indonesia melewati skema tindakan sosial sehingga penulis membagikan kesempatan dalam pengembangan analisis lanjutan, semacam

terkait pendekatan pilihan rasional yang dimanfaatkan guna membagikan perspektif lain mengenai dinamika partai Islam di Indonesia.

Kajian kedua ditulis oleh Chandra dkk. (2021) berjudul *Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia* dengan penerbit oleh jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Fokus penelitian ini tentang partai politik yang dibagikan anggaran atas perbantuan negara wajib berguna guna masyarakat salah satunya berupa pendidikan politik, anggaran yang besar atas negara guna melangsungkan fungsinya dengan baik. Dalam penelitian ini penulis membahas terkait bagaimana partai politik yang memperoleh anggaran atas pemerintah melewati APBD serta APBN sebagai utilitas publik pada demokrasi di Indonesia. Partai politik di berikan anggaran APBD supaya bisa melangsungkan pendidikan politik guna masyarakatnya, sebab partai politik tidak hanya untuk perebutan kekuasaan pemerintahan saja namun partai politik wajib dapat digunakan dalam publik seperti pendidikan yang dibagikan kepada seluruh masyarakatnya.

Lebih lanjut penulis juga membahas terkait anggaran yang diperbantuan oleh negara pula wajib berimbang pada partai pada melangsungkan fungsinya sehingga suatu sistematisa demokrasi akan berlangsung baik bila partai politik melangsungkan fungsinya secara baik.

2. Kajian Pembiayaan Partai di Pilkada

Dalam kajian tentang pembiayaan partai di pilkada ini bersumber atas berbagai penelitian yang berkesamaan topik. Sebagai halnya yang sudah dilangsungkan oleh (lihat Syarwi, 2016; Hisbul, 2021; Dewi, 2011; Yaqin, dkk, 2021; Witianti, dkk, 2021; Pustika, 2017; Gustina, 2019; Samsir, dkk, 2023). Kajian yang dilakukan oleh Pangsi Syarwi (2016) tentang evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama 2015, penulis telah menjelaskan hasil evaluasi dari pilkada serentak ini dapat digunakan guna perbaikan kualitas penyelenggaraan pilkada serentak dalam masa kedepannya. Kemudian kajian Hisbul (2021) tentang analisis transparan serta akuntabilitas keuangan partai politik pada pendanaan partai politik. Penulis juga menjelaskan terkait usaha penanggulangan tindak pidana korupsi yang berhubungan pada keuangan partai politik.

Kemudian kajian Dewi (2011) tentang kegagalan partai demokrat dalam melakukan pembentukan koalisi pada pilkada Kota Bukit Tinggi tahun 2020. Penulis

menjelaskan ideologi partai sangat penting karena digunakan sebagai identitas nilai untuk diprioritaskan dalam membentuk koalisi agar bisa mendapatkan kehormatan dan marwah di partai lain. Selanjutnya kajian oleh Yaqin, dkk (2021) tentang pembentukan koalisi partai politik. Penulis juga menjelaskan pembentukan koalisisi partai politik dari pendukung Machfud Arifin- Mujiman pada Pilkada Surabaya 2020 dimengerti bahwasannya sistematikan terwujudnya koalisi tersebut yakni rancangan atas partai diluar PDIP. Kemudian kajian dari Witianti, dkk (2021) tentang pengaruh kekuatan oligarki dalam proses rekrutmen. Penulis telah menjelaskan bahwasannya dalam seleksi kandidat serta kekuaatan finansial dapat berpengaruh dalam mengimbangi proses rekrutmen tersebut.

Selanjutnya kajian dari Gholal (2017) tentang kemenangan calon perseorangan dalam pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015. Penulis menjelaskan bahwa faktor yang menjadi alasan calon perseorangan kandidat melalui jalur independen dapat memenangi pilkada dalam memperoleh kekuasaan karena menggunakan empat faktor seperti halnya figuritas, kekuatan mesin politik, strategi yang digunakan, dan melalui ekonomi politiknya. Selanjutnya kajian dari Gustina (2019) tentang koalisis partai islam dalam pemilihan kepala Daerah Mesuji Tahun 2017. Penulis menjelaskan terkait siasat PKS pada memenangkan pasangan Khamami serta Saply bahwasanya PKS memeberikan dukungan penuh terhadap pasangan tersebut dengan cara sosialisasi, kader diarahkan serta suara dijaga dan selain itu strategi kampanyeya dengan cara pengoptimalan kampanye langsung kepada masyarakat bersamaan cara *door to door* guna menjalankan visi misi atas pasangan yang didukung. Selanjutnya Kajian dari Hamajen, dkk (2023) tentang strategi politik dalam pemenangan pasangan di Pilkadda Kabupaten Halmahera Selatan 2020. Penulis menejelaskan bahwasannya dalam kajian ini strategi politik pemenangan pasangan Usman Sidik serta Hasan Ali Bassam Kasuda di Pilkada telah memperkuat jaringan kampanye melalui kampanye kepelosok desa sampai dengan promosi program politiknya.

Kajian pertama ditulis oleh Syarwi (2016) dengan judul *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015* diterbitkan oleh jurnal politik Indonesia. Hasil dari kajian yang dilakukan penulis adalah evaluasi pelaksanaan pilkada yang sebagai pencatatan guna perbaikan kualitas penyelenggaraan pilkada serentak pada masa kedepannya sepertihalnya pilkada serentak belum efesien, pilkada serentak belum dapat menambah partisipasi politik, pilkada serentak belum dapat menjadi

penutup celah adanya politik uang, belum adanya keterbukaan serta transparansi rekrutmen penjangkaran paslon kepada daerah, pembiayaan pilkada serentak tidak terbebaskan atas APBD. Kajian ini memanfaatkan penelitian lapangan bersamaan pendekatan kualitatif yang dilangsungkan data primer serta sekunder. Sumber primer yang didapatkan dengan wawancara dari informan perkumpulan guna Pemilu dan Demokrasi dan yang telah menguasai permasalahan pemilu. Dari kajian pustaka yang dilakukan di atas secara general konteks Indonesia telah menjadi landasan atas varian secara empirik dan hipotesis yang bisa diterapkan di Indonesia. Pada penelitian ini, fokus peneliti yakni terkait evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama tahun 2015, yang dimana hasil evaluasi tersebut mampu sebagai pencatatan guna perbaikan kualitas penyelenggaraan pilkada serentak pada masa kedepannya.

Kajian kedua ditulis oleh Hisbul (2021) dengan judul *Korupsi Partai Politik dan Aliran Dana Pilkada dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* di terbitkan oleh jurnal Jatiswara korupsi partai politik. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada transparansi serta akuntabilitas keuangan partai politik pada pengadaan dana partai politik serta usaha penanggulangan tindak pidana korupsi yang berhubungan pada keuangan partai politik. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilangsungkan penelitian pada bahan kepustakaan dengan aturan perundang-undangan selaku bahan hukum primer. Dalam penelitian ini lebih fokus pada sinkronisasi hukum bersamaan fokus dalam pengaplikasian aturan atau norma pada hukum positif. Penelitian hukum ini telah dimanfaatkan guna menjumpai suatu kebenaran koherensi yang mencangkup aturan hukum searah norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan searah pada prinsip hukum selanjutnya apakah perbuatan individu searah pada norma hukum atau justru prinsip hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu urgensi serta transparansi maupu akuntabilitas keuangan partai politik pada pembuatan dana partai politik yang butuh dibuat pengelolaan dengan akuntabel, transparan, serta profesional yang pertama terdapat kepercayaan publik anatar elit politik bersamaan masyarakat, kedua mendukung kepercayaan publik serta menambah kontribusi publik pada pemilu serta kebijakan publik, ketiga menjadi perbantuan politik lebih akuntabel tidak hanya terdapat persoalan uang serta keuntungan materiil saja, keempat menjadi pencegahan penerimaan *money politic*, kelima untuk pencegahan peluang penyelewengan dana publik serta keenam mendukung persaingan yang kompetitif dan penguatan penegakan

hukum.

Kajian ketiga ditulis oleh Rahmi (2024) dengan judul *Kegagalan Partai Demokrat dalam Melakukan Pembentukan Koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020*. Pada penelitian ini penulis memanfaatkan metode kualitatif bersamaan tipe penelitian studi kasus interistik, serta hasil dari penelitian ini adalah faktor ideologis partai Demokrat yang tidak mempertimbangkan ideologi, visi, misi untuk melakukan koalisi dengan partai lain, sedangkan ideologis partai sangat penting sebagai identitas nilai untuk di prioritaskan dalam membentuk koalisi.

Kajian keempat ditulis oleh Yaqin, dkk. (2021) dengan judul *Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfuud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020*. Dalam kajiannya penulis memaparkan terkait wacana pembentuk koalisi strategis, kesamaan platform partai koalisi pengusung Machfud Arifin-Mujiaman, Landasan historis partai pengusung paslon, motivasi pragmatis koalisi pengusung paslon, dan tingkat motivasi koalisi mayoritas pengusung Machfud Arifin. Penelitian ini telah memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, serta dokumentasi, dalam penelitian ini peneliti menandakan penemuan proses penciptaan koalisi pengusung paslon yang dimulai dengan rancangan strategis antar Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat serta PKS yang telah berorientasi taktis membuat tumbang dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya sejak reformasi.

Kajian Kelima ditulis oleh Witianti, dkk. (2021) dengan judul *Proses Rekrutmen dan Seleksi Kandidat di Internal PDI Perjuangan pada Pilkada Cimahi Tahun 2017*. Dalam kajiannya penulis telah memaparkan terkait peran tim seleksi, seleksi kandidat di Internal PDIP pada Pilkada Cimahi 2017 bahkan perumusan keputusan calon PDIP pada Pilkada Cimahi 2017. Penelitian ini telah memanfaatkan pendekatan kualitatif bersamaan pengamatan serta pendengaran atas narasumber guna memperoleh pengertian holistik. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasanya tim seleksi tingkat lokal tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural pada sistematisasi seleksi, namun terdapat peran yang lebih dalam melaksanakan *screening* bakal calon, terlebih berhubungan komitmen yang akan dibagikan kepada partai, Dominasi maupun kekuatan kewenangan dalam DPP dalam memutuskan hasil seleksi masih mencolok sehingga tim seleksi pusat bergantung sekali pada ketetapan yang diberikan

oleh DPP.

Kajian keenam ditulis oleh Puthika (2017) dengan judul *Analisis Kemenangan Calon Perseorangan Pasangan Abdul Hafidz- Bayu Andriyanto dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015*. Dalam kajian ini peneliti telah memaparkan terkait empat faktor yang menjadi alasan paslon Abdul Hafidz yang maju telah melalui jalur independen sehingga dapat memenangi pilkada untuk memperoleh kekuasaan. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan metode penelitian kualitatif bersamaan hasil wawancara mendalam dengan narasumber dan dari KPU Kabupaten Rembang. Selanjutnya hasil dari penelitian ini bahwasannya dalam kemenangan paslon Abdul Hafidz dalam pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015 dikarenakan adanya empat faktor yang menjadikan paslon tersebut maju melalui jalur independen, yaitu terdapat faktor figurasi paslon. Kekuatan mesin dari paslon, strategi yang digunakan oleh paslon, dan melalui faktor ekonomi dari paslon Abdul Hafidz- Bayu Andriyanto.

Kajian ketujuh ditulis oleh Gustina (2019) dengan judul *Koalisi Partai Islam dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji TAHUN 2017 Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera*. Dalam kajian ini peneliti membahas terkait strategi PKS dalam memenangkan pasangan Khamami dan Saply pada pemilihan kepala daerah Mesuji Tahun 2017. Peneliti pada meneliti telah menggunakan penelitian lapangan atau “*field reserch*” yakni cara yang dimanfaatkan guna memperoleh data yang realitis berada di lingkungan masyarakat serta bersifat deskriptif bersamaan cara diskripsi kualitatif secara cara berfikir induktif yakni asalnya atas fakta khusus kemudian dijelaskan secara umum. Selanjutnya peneliti mempunyai tujuan guna mengerti wujud dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada paslon Khamami- Saply dan mengerti siasat

yang dilangsungkan Partai Keadilan Sejahtera guna menciptakan kemenangan pasangan calon Khamami-Saply yang didukung pada pemilihan kepala daerah Mesuji tahun 2017. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwasanya terdapat siasat yang dibagikan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dalam penelitian ini strategi yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalama memnangkan paslon Khamami-Seply bersamaan cara pengoptimalan kampanye langsung kepada masyarakat dengan cara *door to door* guna emnjalakan visi maupun misi atas pasangan yang menjadi dukungannya selain itu Partai Keadilan Sejahtera juga melangsungkan

konsolidasi bersamaan partai pendukung serta sosialisasi kepada pemilih Partai Keadilan Sejahtera serta sesudah melaksanakan pilkada paratai ini telah melangsungkan pengawalan pada bupati terpilih dengan cara membagikan saran maupun masukan berhubungan kebijakan pemerintah daerah.

Kajian kedelapan ditulis oleh Samsir Hamajen, dkk. (2023) dengan judul *Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik- hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020*. Dalam kajiannya penulis telah memaparkan terkait koalisi, strategi kampanye dalam memenangkan pilkada. Penelitian ini telah menggunakan pendekatan kualitatif bersamaan teknik pengumpulan data melewati wawancara sejumlah tokoh partai politik serta tokoh di Halmahera Selatan. Selanjutnya dalam kajian ini hasil dari penelitiannya yaitu siasat memenangkan kegagalan petahanan Bupati Halmahera Selatan yang tdaik bisa mengajukan pencalonan diri lagi, kedua paslon Usman- Bassam melangsungkan penggalangan koalisi besar bersamaan rangkulan sembilan partai politik yang telah menjadi penguasa 21 kursi di DPRD Halmahera Selatan, ketiga siasat kemenangan pasangan Usman- Bassam dilangsungkan bersamaan memperkuat kampanye baik lewat jaringan kamapanye ke pelosok desa hingga pada promosi program politiknya. Dengan hal tersebut peneliti mempunyai tujuan dalam kajian ini yaitu guna pengkajian strategi politik kemenangan pasangan Usman-Bassam di Pilkada Kabupaten Helmahera Selatan, Maluku Utara tahun 2020.

3. Kajian Pembiayaan Partai di Pemilu

Kajian tentang pembiayaan partai di pemilu ini bersumber atas berbagai penelitian berkesamaan topik. Sebagai halnya yang sudah dilangsungkan pada (lihat Novendi & Syamsul, 2020; Sukmajati & Aditya , 2018; Elvira , 2013; Purwosusanto, 2023; Fajar, 2019). Berlangsungnya kajian atas Novendi dkk (2020) mengenai jumlah serta nominal pembiayaan calon anggota DPD terpilih yang bisa dimanfaatkan sebagai usaha pemenang kursi dan setiap calon terpilih. Kemudian kajian Elvira (2013) tentang siasat kehumasan partai politik dilangsungkan bersamaan berbagai pendekatan secara personal, sosial, maupun secara kultural. Selain itu pula pada memanfaatkan media humas, melangsungkan aksi langsung, dan kampanye yang telah membuat keterlibatan masa langsung. Selanjutnya kajian dari Purwosusanto (2023) mengenai siasat kampanye politik masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan

PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2019. Selain itu dalam Penelitian ini PKS juga dikatakan sebagai partai yang bertahan dan berbasis Islam yang telah berhasil memberikan suara pada pemilu 2019.

Kajian pertama ditulis oleh Novendi dkk. (2020) yang berjudul *Analisis Dana Kampanye Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilu Serentak 2019* diterbitkan oleh jurnal Akuntansi dan Keuangan. Penelitian ini berfokus pada total serta nominal pembiayaan calon anggota DPD yang terpilih sehingga dapat dimanfaatkan guna upaya pemenangan kursi atas setiap calon terpilih. Penulis menjelaskan bahwa pada konteks akuntabilitas itu terdapat dua hal yang umumnya disorot oleh publik, yaitu seorang calon apakah melangsungkan pembiayaan keseluruhan aktivitas pencalonannya atas pribadi atau justru terdapat keterlibatan pihak lain terlebih atas partai politik dan mengapa calon tersebut tidak bisa menjabarkan secara rinci searah pada apa yang telah ada di undang-undang. Hasil dari penelitian ini bahwasannya telah menemukan hal yang menarik berhubungan pada pembiayaan pemilu DPD dalam Pemilu Serentak 2019 yang lalu. Bahwasanya peneliti telah menemukan suatu masalah terkait kuatnya korelasi terkait pembiayaan kampanye bersamaan total besar bisa membuat besar peluang kemenangan di provinsi tersebut. Namun rata-rata biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp 400 juta dengan rata-rata *cost/vote* yaitu 3.500.

Kajian kedua ditulis oleh Elvira (2013) yang berjudul *Strategi Kampanye Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014*. Penelitian ini berfokus pada siasat kehumasan partai politik dilangsungkan bersamaan berbagai pendekatan secara personal, sosial, maupun secara kultural. Selain itu pula bersamaan memanfaatkan media humas, melangsungkan aksi langsung, dan keterlibatan masa langsung pada kampanye. Penulis menjelaskan bahwa berbagai strategi yang dilakukan untuk kampanye serta kegiatan kehumasan telah dilangsungkan atas partai politik demi guna ketertarikan simpatisan masyarakat sendiri, dari Partai PKB dan PPP pada siasat kampanye humasnya lebih fokus pada pencarian suara serta dukungan sebanyak-banyaknya semacam halnya kampanye terbuka ataupun tertutup lewat media daring serta perangkat komunikasi, multimedia yang berhubungan secara langsung pada

masyarakat lalu melangsungkan pendekatan personal, sosial dan kultural, kedua partai tersebut telah menggunakan strategi kehumasan untuk meningkatkan citra partai, dan memiliki tujuan utama dari strategi kampanye humas kedua partai tersebut adalah guna membentuk citra positif partai di mata publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, penerimaan, serta dukungan publik terhadap partai tersebut. Hasil dari penelitian ini terkait siasat kampanye humas oleh PPP serta PKB pada menambah citra partai menjelang pemilu 2014 dan kedua partai tersebut melakukan tahapan perencanaan strategi diantaranya terkait tahapan perancangan siasat kampanye humas dan penerapannya terhadap strategi kampanye humas.

Kajian ketiga ditulis oleh Purwosusanto (2023) yang berjudul *Komunikasi Politik Partai Islam dan Partai Nasionalis : Studi Komparatif Strategi Kampanye Politik PKS dan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019*. Penelitian ini berfokus tentang strategi kampanye politik masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 2019. Dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi kampanye politik PKS maupun PDI Perjuangan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari ideologi partai yang berbeda. PKS yang sebagai partai Islam sehingga memiliki basis ideologi nasionalisme Indonesia. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pandangan dalam hal agama dan peran negara. PKS telah berfokus pada pemilih yang mengidentifikasi diri mereka dengan Islamisme politik dan nilai-nilai Islam. Dalam kampanyenya, PKS lebih menekankan pada isu-isu agama dan kesejahteraan sosial yang relevan bagi pemilih muslim. Sedangkan PDI Perjuangan telah mencoba untuk merangkul pemilih dari berbagai latar belakang dengan fokus pada isu-isu nasionalis dan keadilan sosial termasuk di dalamnya juga menyelipkan ruang lebih untuk pemilih muslim. Pesan kampanye PKS sendiri cenderung lebih menggunakan pesan-pesan yang mengandalkan agama dan nilai-nilai Islam, serta menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sementara itu, PDI Perjuangan menekankan pada isu-isu nasionalis seperti kedaulatan negara, berbangsa, dan keadilan sosial. Dari hasil penelitian ini bahwasanya telah ditemukan terkait PKS berproses menjadi Pos-Islamis dan PDI Perjuangan semakin akomodatif terhadap kalangan Islam dalam strategi kampanye politiknya. Selanjutnya PKS merambah daerah pedesaan dan PDI Perjuangan merambah ke kalangan Islam. Kemudian PKS dikatakan sebagai spirit kader terpimpin dalam Majelis Syura dan PDI Perjuangan spirit kader terpimpin pada

Ketua Umum dan PKS maupun PDI Perjuangan telah menerapkan manajerial yang baik dalam strategi kampanye politik.

Dari kajian pustaka yang dilakukan di atas dilihat dari sisi pembiayaan kampanye sebagai organisasi, pembiayaan kampanye di Pilkada, dan pembiayaan kampanye di Pemilu, bahwasanya penulis telah menganalisa pelaksanaan pembiayaan kampanye tentang konseptual tentang skema tidakan sosial, parpol yang diberikan anggaran oleh negara harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, serta transparan dan akuntabilitas terkait pembiayaan kampanye serta evaluasi terkait pelaksanaan pilkada untuk pilkada selanjutnya yang akan datang.

Pada penelitian ini, fokus peneliti yakni berhubungan pembiayaan kampanye politik partai Islam pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Hal ini akan menjadi tambahan pengertian secara keseluruhan terkait perbedaan pola pembiayaan kampanye atau kandidat PPP dan PKS dalam segi penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran. Selain itu juga membahas terkait kondisi terkait pola pembiayaan yang dilakukan para kandidat PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Lalu, yang menjadi ketertarikan pada penelitian ini yakni dinamika pembiayaan kampanye politik, khususnya dalam konteks partai Islam di Indonesia pada perbandingan antara PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah dan strategi kampanye perkandidat dalam memenangkan pemilu 2024 di Jawa Tengah. Dengan inilah, penelitian yang sudah dilaksanakan terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yang mempunyai keserupaan tema, oleh karenanya peneliti ini selaku ketertarikan guna dibuat kajian.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud guna mengerti realitas sosial sebagai halnya adanya, sehingga peneliti harus berpikiran terbuka. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat eksploratif, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang harus memiliki pengetahuan luas. Penelitian kualitatif membuat penekanan pada makna serta nilai, dimanfaatkan untuk persoalan yang belum jelas, mengerti interaksi sosial, pengembangan teori, kebenaran data yang dipastikan, serta sejarah perkembangan yang diteliti (Mamik, 2018). Sedangkan

pendekatan studi kasus adalah metode penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata. Metode ini memungkinkan penyelidikan holistik dan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan interaksi. Studi kasus digunakan dalam penelitian kualitatif atau campuran untuk menggali informasi kaya, mengungkapkan pola unik, kompleksitas, dan konteks yang mempengaruhi kasus, sehingga bermanfaat untuk memahami fenomena kompleks dan (Creswell, 2015).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengandalkan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan informan. Informan ini dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, semacam observasi, wawancara, dan metode lainnya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendanaan kampanye di Indonesia khususnya di Jawa Tengah pada lingkungan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera serta menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang telah diajukan dan dijelaskan (Rahmadi, 2018).

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi data yang akurat sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sehingga, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil informasi dari proses wawancara secara langsung dan observasi secara tidak langsung. Dimana dalam wawancara yang akan ditemukan adalah mengenai informasi atas permasalahan pertanyaan penelitian untuk membantu peneliti dalam menjawab hasil pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan, observasi secara tidak langsung dalam penelitian ini yang dihasilkan adalah dokumen sebagai bahan untuk menganalisis jawaban penelitian. Objek utama penelitian atau selaku data primer yakni calon pemenang dari partai PPP dan PKS yang masing-masing partai berjumlah 3 calon (Creswell, 2007).

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam penelitian oleh peneliti tidak didapatkan secara langsung dari pihak informan di lapangan. Sumber data

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang didapatkan dari buku, jurnal penelitian, dan artikel penelitian yang relevan sesuai tema penelitian. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur antara lain buku, jurnal penelitian, artikel dan berbagai media cetak dan elektronik yang masih berkaitan dengan subjek penelitian ini yaitu dana kampanye (Creswell, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Wawancara ialah cara untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dieksekusi melalui tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang sudah ditemukan wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penelitian ini mempunyai beberapa narasumber sebagai informan antara lain pihak anggota DPRD PPP (H. Nurul Furqon, SE,MM, Ali Wafa, dr Hj. Sholeha Kurniawati) dan dari pihak anggota DPRD PKS (H. Muhammad Afif, Lc, Hj Ida Farida, M.pd, Much. Muchlis Ariston, S.T).

b. Studi Dokumen dan Literatur

Dokumentasi merupakan informasi tambahan yang digunakan untuk menyimpan fakta dan data dalam komponen dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia dengan bentuk pengumpulan dokumen, foto wawancara, foto anggran yang berkaitan dengan pembiayaan kampanye pemilu 2024. Ciri utama atas data ini yakni tidak terbatasnya ruang serta waktu serta memungkinkan peneliti memperoleh wawasan tentang peristiwa masa lalu. Kegiatan dokumentasi bertujuan untuk melengkapi informasi yang sudah ada berupa surat, arsip, laporan dan buku harian kegiatan yang dibuat pada saat observasi. Hal ini dapat melengkapi dan memperkuat temuan-temuan yang ada di lapangan sebagai bukti kebenaran dan keabsahan data. Maksud atas studi literatur ini yakni guna membuat analisis beberapa teori tentang menulis yang dijadikan rujukan pada analisis tulisan.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara menganalisis data penelitian menjadi sebuah informasi yang digunakan nantinya untuk pedoman dalam melakukan pengembangan dari hasil data tersebut. Sehingga, teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan cara analisis yang bersifat deskriptif atau berupa proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu melalui beberapa tahapan. Adapun penelitian unu menggunakan pengumpulan data, sebagai berikut (Craswell, 2007).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari sebuah data lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil data sebagai bentuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan penelitian.

b. Redukasi Data

Redukasi data adalah suatu proses pemilihan untuk menyederhanakan data kasar yang didapatkan dari catatan-catatan yang tertulis dalam kondisi di lapangan. Dimana redukasi data digunakan untuk memilih data yang penting untuk diperlukan dalam penelitian dan data yang harus diseleksi. Hal ini bermaksud untuk mendapatkan hasil dari informasi yang penting, sehingga memudahkan dalam melakukan penariak kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan bertujuan untuk pengemasan suatu kegiatan bertujuan untuk pengemasan suatu data agar mudah untuk dipahami dengan hal ini dalam menganalisis disesuaikan tujuan yang hendak diinginkan. Maka dari itu, bentuk dari penyajian data adalah berupa laporan. Laporan tersebut dianalisis secara deskriptif nalitik dan logis yang mengarah pada hasil kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memahami dan mencari makna atau pola-pola serta penjelasan dalam alur sebab akibat. Cara penarikan kesimpulan penelitian ini adalah dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara dari suatu hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum (Creswell, 2007).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta

manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada BAB I juga akan dijelaskan metode serta pendekatan yang digunakan pada penelitian, serta pengertian dan konsep teoritis yang dimanfaatkan untuk analisisnya. Pada akhir BAB ini dijelaskan struktur sistematika surat sehingga terciptalah keutuhan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang digunakan tergantung pada topik yang dibahas. Penjelasan teoritis dipersempit menjadi penjelasan kontekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep-konsep yang dijadikan sebagai kerangka konseptual ketika menganalisis data penelitian.

BAB III LANDSCAPE JAWA TENGAH

Dalam Bab ini dipaparkan terkait kondisi geografis dan demografis, struktur sosial ekonomi masyarakat Jawa Tengah, dan struktur politik di Jawa Tengah yang meliputi : peta Partai Politik di parlemen dan kursi Partai Politik di DPRD hasil Pemilu 2004-2024.

BAB IV PROFIL PARA CALEG DPRD JAWA TENGAH

Bab ini menjelaskan terkait profil para anggota legislatif DPRD di Jawa Tengah dari tiga anggota masing-masing partai Islam yaitu PPP dan PKS.

BAB V POLA PEMBIAYAAN KAMPANYE KANDIDAT PPP DAN PKS DALAM SEGI PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGELUARAN

Bab ini membahas terkait mekanisme pengelolaan dana kampanye, sumber pendanaan kampanye, transparansi dan akuntabilitas maupun efektivitas penggunaan dana kampanye.

BAB VI KONDISI PENENTUAN POLA PEMBIAYAAN DARI MASING-MASING KANDIDAT

Bab ini membahas tentang kondisi relevan yang menentukan pola pembiayaan anggota PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Yang dimana dalam bab ini akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pola pembiayaan, kondisi pembiayaan dari kandidat PPP maupun PKS, dan perbandingan pola pembiayaan PPP dan PKS.

BAB VII PENUTUP

Bab ini kami menyajikan kesimpulan atas keseluruhan serangkaian proses penelitian yang dilaksanakan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang disampaikan penulis. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya di masa

kedepannya supaya kami dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

BAB II

EKONOMI POLITIK MARXIAN

Bab ini membahas mengenai definisi konseptual dan landasan teoritik dalam teori Ekonomi Politik Oleh Marxian. Teori ini digunakan untuk menganalisis pembiayaan kampanye politik partai Islam pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah PPP dan PKS.

A. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan Politik

Pembahasan konsep berhubungan pada fungsi dan peran uang di dalam politik berupa pembiayaan politik. Pembiayaan politik adalah seluruh aktifitas penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan atas partai politik baik untuk membiayai kegiatan kampanye serta pembiayaan operasional dan organisasi lainnya.

Falguera dkk. (2014) mendefinisikan pembiayaan politik sebagai dukungan berupa dana yang diperoleh secara sah atau tidak sah atas aktivitas partai politik serta kampanye pemilu yang sedang berjalan, terutama pada wujud kampanye terhadap calon serta partai politik lalu dari partai lain (Perdana, 2018). Terkait pendanaan partai politik, Scarrow (2007) berfokus pada sumber pendanaan yang diterima partai politik, semacam iuran keanggotaan, hibah pemerintah, serta keterlibatan dari donor. Sedangkan dana kampanye berfokus pada bagaimana dan kapan dana kampanye dikelola. Hal ini menyebabkan pembiayaan politik mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan partai politik serta pembiayaan kampanye peserta pemilu dalam dua dimensi, yaitu dimensi pendapatan dan pengeluaran (Perdana, 2018).

Pandangan Mas'ood dan Savirani (2011), yang dikutip Perdana (2018), penelitian berhubungan keuangan politik tidak hanya sekedar tentang dana kampanye. Penjelasan setiap siasat pendanaan politik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman kinerja politik. Pembiayaan politik melalui kebijakan moneter tidak searah sebab modal budaya, modal politik, serta modal sosial pula mampu berdampak besar pada menjadi dukungan karier politik setiap kandidat.

Ada dua dimensi utama dana kampanye, berupa aspek pendapatan serta aspek

pengeluaran. Aspek pendapatan yakni siapa yang menyumbang dana kampanye serta berapa besar sumbangan donatur. Kemudian pada sisi pengeluaran terdapat biaya pembuatan dan pemajangan brosur, poster, dan penyelenggaraan konvoi pendukung calon, bahkan untuk transportasi, konsumsi, pakaian kampanye, serta iklan di media massa (Sukmajati, 2019).

b. Kampanye dan Pengaturan Dana Kampanye

1. Konsep Kampanye

Guna peserta pemilu parlemen, berkampanye merupakan peluang untuk menarik dan membujuk pemilih. Kampanye kini menjadi salah satu cara untuk menghadirkan kandidat yang layak dipilih oleh pemilih dalam pemilu. Tentu saja menjalankan kampanye membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semakin besar dan kuat kampanyenya, maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan (Putra, 2018). Rice serta Paisley menjelaskan jika kampanye adalah keinginan guna menciptakan pengaruh keyakinan dan perilaku individu lain bersamaan daya tarik komunikatif dan dilangsungkan atas sekelompok orang atau organisasi politik bermaksud untuk memperoleh simpatisan atas dorongan politik masyarakat di suatu negara (Fatimah, 2018).

2. Tujuan Pengaturan Dana Kampanye

Uang adalah alat krusial guna mengendalikan sumber daya. Umumnya dimanfaatkan atas lembaga legislatif serta eksekutif untuk menukarkan uang dengan sumbangan sesuai bersamaan pengambilan keputusan serta kebijakan. Tujuan pengaturan dana kampanye adalah untuk membatasi dan mengelola sumber daya pelaporan. Pertama, mungkin terdapat keterbatasan sumber daya kampanye yang bertujuan untuk memastikan persaingan yang adil dan setara di antara para peserta pemilu. Kedua, pengelolaan dana kampanye harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada penyelewengan dana kampanye guna partai politik, kandidat, serta tim kampanye guna maksud yang tidak berkaitan dengan kemenangan pemilu. Ketiga, pemilih perlu mengetahui sumber, jumlah serta alokasi dana kampanye sehingga korelasi antara partai politik dan kandidat terpilih mampu mempengaruhi pengambilan ketetapan serta pengambilan kebijakan pasca pemilu (Wulandari, 2015).

3. Prinsip Pengaturan Dana Kampanye

Pengaturan dana kampanye dilangsungkan bermaksud untuk membuat pengaturan partai politik dan kandidat pada penerimaan sumbangan sehingga mampu

menghimpun dana kampanye dengan tetap menjaga independensinya pada membuat perjuangan keperluan rakyat (Ewing & Issachardoff, 2016). Prinsip utama pengaturan dana kampanye adalah transparansi serta akuntabilitas. Sesuai prinsip transparansi, kandidat serta partai politik harus terbuka sepanjang sistematika pengadaan kampanye. Dalam hal ini terdapat laporan keuangan untuk menilai konsep keterbukaan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dana kampanye (Wulandari, 2015).

B. Kerangka Teori : Ekonomi Politik

Dalam penelitian ini, saya mengacu pada kerangka teori utama untuk menganalisis fenomena pembiayaan kampanye politik caleg partai Islam pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah PPP dan PKS. Studi yang mengenai dana kampanye cenderung berfokus pada regulasi dana kampanye formal dan pengeluaran yang berkaitan dengan kampanye pemilu yang terprogram, seperti iklan di televisi dan kehadiran di media sosial. Namun demikian, kampanye pemilu tidak hanya melibatkan program kebijakan kepada para pemilih, di sebagian besar negara, kampanye juga melibatkan strategi politik klien yaitu praktik memberikan bantuan pribadi seperti uang atau hadiah kepada para pemilih dan donatur kampanye sebagai imbalan atas dukungan mereka (lihat Kitschelt, 2000; Kitschelt dan Wilkinson, 2007), yang sering kali menjadi pendorong utama pengeluaran kampanye.

Untuk melakukan hal tersebut, penelitian ini akan dikembangkan dari kerangka ekonomi politik, telah menjabarkan, jika politik ekonomi landasannya unsur atau elemen sebagai alat ekonomi serta rasionalisasi kekuatan politik yang melangsungkan berbagai rancangan aplikasi ekonomi dalam memperoleh target yang telah diinginkan (Mufti, 2013). Oleh karenanya, asumsi yang dimanfaatkan pada ilmu politik yakni usaha penciptaan kebijakan publik dengan bersamaan bukan perseorangan. Kebijakan ini senantiasa membuat perhatian atas struktur kekuasaan serta sosial yang terdapat pada masyarakat, terkhusus pada masyarakat yang menjadi sasaran di suatu kebijakan (Maranda, 2019).

Untuk mengimplementasikan dan menguji sebuah kerangka teori analisis yang dapat disebut sebagai pendekatan ekonomi politik terhadap dana kampanye. Pendekatan ini melibatkan pengintegrasian studi yang lebih umum tentang insentif pengeluaran yang dihadapi politisi dengan studi yang sebagaimana besar telah diabaikan tentang insentif pendanaan yang dihadapi para penyumbang kampanye. Karena pengeluaran kampanye juga merupakan produk dari jumlah uang yang dapat diperoleh politisi, maka studi mendalam dana kampanye dalam konteks negara demokrasi maju perlu memperhatikan insentif yang telah dihadapi para penyumbang dana kampanye seperti perusahaan dan individu kaya, atau disebut dengan

sumber pendanaan kampanye plutokratis yang menggambarkan bahwa kekuasaan hanya dikendalikan orang-orang yang memiliki kekayaan (Nassmacher, 2009). Dalam kata lain, pendekatan ekonomi politik dalam penelitian ini terhadap dana kampanye khususnya pada caleg DPRD PPP dan PKS Jawa Tengah telah melibatkan faktor-faktor yang membentuk karakter interaksi politik bisnis.

Terdapat beberapa pendekatan yang ada dalam ekonomi politik berupa pendekatan yang terpusat pada pasar serta pendekatan yang terpusat pada negara. Pendekatan yang terpusat pada negara telah dilandasi oleh agenda sendiri pada hubungannya dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Asumsi pendekatan ini berlawanan sekali pada pendekatan ekonomi politik liberal klasik ataupun turunannya neoliberal, jika peranan pemerintah relatif terbatas hanya selaku menjaga stabilitas, yang memungkinkan pasar dalam melangsungkan fungsinya dengan kesempurnaan (Sasmita, dkk:2022).

Untuk melihat proses ekonomi politik, maka dibutuhkan pendekatan khusus. Banyak pendekatan yang menjadi alat analisa dalam melihat proses ekonomi politik, salah satunya ialah pendekatan Marxian. Dalam pendekatan Marxian terdapat pandangan politik selaku pemisah antara masyarakat sipil atas wilayah publik, dimana hak kesetaraan dianggap hanya pada wilayah publik, politik disini berperan selaku mengelola kepentingan negara untuk memahami hubungan negara dengan perekonomian. Teori Marxian lebih terfokus dalam sistematika reproduksi bersifat objektif serta didalamnya tidak terfokus pada sistematika subjektif berupa penetapan peringkat kesempatan bahkan penciptaan pemilihan seseorang. Istilah ekonomi politik yang dimanfaatkan pada teori marxian mengacu dalam suatu pemikiran berhubungan perekonomian yang dilandasi pada metode serta teori atas pemikiran-pemikiran ekonomi klasik. Tiga alasan dalam pendekatan Marxian berupa politik revolusioner, politik kompromi kelas, teori negara marxis (Caporaso dan Levine, 2015; 123-178).

Istilah ekonomi politik yang dimanfaatkan pada teori Marxian tidak mengacu dalam berbagai pemikiran yang berkaitan dengan korelasi antara ekonomi bersamaan politik, melainkan mengacu dalam cara berpikir berhubungan perekonomian yang dilandasi dalam metode serta teori atas berbagai pemikiran ekonomi klasik, terlebih Adam Smith serta David Ricardo (Caporaso & Levine, 2008:124). Maka dari itu pendekatan Marxian dalam ekonomi politiknya telah membuat pengajuan suatu persoalan berupa bagaimana cara menjadi penghubung keperluan seseorang bersama tatanan sosial. Hubungan antara politik dan ekonomi Marxian bahwa ekonomi politik mampu dipandang atas beberapa sudut pandang yang berbeda yang berkaitan dengan 3 aliran dalam teori Marxian, yaitu politik revolusioner, politik

kompromi kelas, dan teori negara Marxis. Dari ketiga aliran tersebut telah mempunyai pembeda besar satu sama lain, namun disatukan atas sebuah tema berupa transformasi kepentingan pribadi objektif menjadi keperluan subjektif yang dianut bersamaan atas berbagai individu sehingga menjadi dorongan terwujudnya kelas (Caporoso & Levine, 2008:126).

Marxian dalam pendekatannya telah mengajukan beberapa pendapat mengenai kepentingan, yaitu :

1. Jika keperluan timbul sebab terdapat struktur atas produksi. Apa yang menjadi keperluan atas seseorang akan ditetapkan atas kedudukan seseorang itu pada sistematika produksi sosial. Individu memiliki keperluan ekonomi ataupun kepentingan material untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
2. Kepentingan perseorang atas seseorang individu mampu dimengerti dengan melihat dalam kelas mana seseorang itu berada. Artinya, di kelompok mana pada masyarakat sipil seseorang itu berada akan menetapkan apa keperluan perseorang itu secara berbeda atas seseorang dari kelas lain sehingga menciptakan terkotak-kotaknya seseorang menjadi beberapa kelas. Maka kepentingan-kepentingan yang timbul pada masyarakat sipil yakni senantasi merupakan keperluan kelas, walaupun secara implisit.
3. Kepentingan kelas yang satu akan berlawanan pada keperluan kelas yang lain. Tingkat sejauh mana suatu kelas khusus berhasil memperoleh keperluannya sekaligus menetapkan seberapa besar kelas yang lain berlangsung kegagalan pada memperoleh kepentingannya.
4. Kepentingan kelas yang terbentuk pada sistem produksi akan menjadi kepentingan politik, berupa pertarungan guna membuat perebutan kekuasaan negara.

Dari keempat pokok pikiran ini sudah menunjukkan beberapa aspek kepentingan atas pergantian keperluan material pribadi menjadi tindakan politik (Caporoso & Levine, 2008:129). Selain itu pendekatan Marxian terhadap ekonomi politik telah membuat pemahaman korelasi negara bersamaan perekonomian yang telah menekankan bahwa tujuan-tujuan dari negara berakar pada kepentingan kelas kapitalis, yang berarti kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kelas kapitalis. Penekanan ini telah didasarkan pada ide bahwa negara bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan dari sebuah tatanan sosial di mana kelas yang satu di eksploitasi oleh kelas yang lain, sehingga menguntungkan kelas tertentu dan membuat faktor ekonomi menjadi sangat dominan dalam kebijakan-kebijakan negara (Caporoso & Levine, 2008:178).

Menurut penjelasan teori marxian di atas, penulis bisa melihat terkait analisis Marxian

terhadap situasi partai politik telah menerima dana dari pengusaha yang berfokus pada hubungan antara kapital dan politik, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kebijakan dan representasi kepentingan masyarakat, hal ini bisa dilihat dari hubungan kapital dan kekuasaan dalam perspektif Marxis bahwasanya partai politik yang menerima dana dari pengusaha cenderung lebih berpihak pada kepentingan kapitalis dan menyampingkan kepentingan kelas kerja sehingga dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Selanjutnya dilihat dari dominasi kelasnya bahwasanya dana dari pengusaha sering digunakan untuk memperkuat dominasi kelas atas. Sehingga partai politik menjadi alat untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan kapitalis dalam menghalangi perubahan sosial yang merugikan mereka (Marx, 2018).

Selain itu dari pandangan Marxian bisa dilihat dari krisis legitimasi bahwa partai politik terlalu bergantung pada dana korporasi, legitimasi mereka di mata publik bisa terancam karena rakyat memandangnya sebagai perwakilan kepentingan pemilik modal bukan sebagai wakil rakyat. Dan dilihat dari kebijakan publik bahwasanya sumber pendanaan dapat mempengaruhi kebijakan publik yang diambil cenderung lebih pro bisnis dan anti buruh. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan perpajakan, ketenagakerjaan, dan lingkungan sehingga dapat menyebabkan politik identitas dan distraksi dalam mengalihkan perhatian terkait ketidakadilan ekonomi sehingga bisa membagi suara dan mengurangi kesadaran kelas di kalangan masyarakat (David, 2013).

Dalam konteks pembiayaan kampanye politik, konsep dasar dari teori ini bisa dipahami dengan melihat bagaimana sumber daya dalam mempengaruhi kebijakan politik dan proses pemilu. Menurut Marxian ekonomi kapitalis telah didominasi oleh kelas pemilik modal yang memiliki sumber daya utama, sehingga dalam konteks politik, kelas pemilik modal juga mengendalikan ataupun mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Pembiayaan kampanye dalam teori ini adalah salah satu mekanisme di mana kapitalisme telah beroperasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Marxian menekankan bahwa negara dalam sistem kapitalis sering berfungsi dalam mempertahankan kepentingan kelas penguasa. Yang di mana kampanye politik telah didanai oleh kelompok-kelompok kaya atau perusahaan besar sehingga menghasilkan kebijakan yang menguntungkan dari kandidat lembaga legislatif tersebut, sehingga pembiayaan kampanye menjadi sarana di mana kekuatan ekonomi dapat memperkuat dominasi mereka dalam arena politik (Hervey, 2010).

Selain itu Teori ekonomi politik Marxian juga menyoroti bahwa politik tidak mampu terpisahkan atas ekonomi, karena uang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan siapa

yang dapat berpartisipasi dalam proses politik, karena kampanye yang membutuhkan dana besar seringkali hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mempunyai sumber daya ekonomi yang besar yaitu kelas pemilik modal. Sehingga partai politik dan calon yang mendapatkan dukungan finansial dari kelompok-kelompok besar akan lebih memiliki peluang dalam memenangkan pemilu. Dalam teori ekonomi politik menurut Marxian juga menekankan bahwa pembiayaan kampanye adalah salah satu cara bagi kelas pengusaha untuk memperbesar kekuasaan politik mereka, dengan menggunakan uang untuk mempengaruhi opini publik dan proses legislatif (Marx, 2018).

Dalam kerangka teori ekonomi politik yang digunakan dalam penelitian ini mengajukan gagasan yang merujuk pada studi sebelumnya bahwa kesediaan pelaku bisnis untuk berkontribusi dalam kampanye pemilu merupakan fungsi dari kekuasaan yang di ambil atas penilaian sendiri yang telah dimiliki oleh politisi atas alokasi hak-hak ekonomi (Khan, 2000). Dengan penelitian kualitatif studi ini akan memperbesar pola pembiayaan kampanye dalam segi penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran pada pendanaan individu politisi. Dengan mempelajari karakter interaksi antara kandidat dan pelaku bisnis, penelitian ini akan hipotesis utama bahwasanya jumlah uang yang dibelanjakan kandidat selama pemilu dibentuk oleh pertimbangan tentang jumlah uang yang diharapkan oleh para kandidat dalam penerimaan atau pengeluaran uang yang tetap dalam setiap jangka waktu tertentu. Dalam hal ini dapat diperkirakan bahwa para masing-masing kandidat yang memiliki koneksi pribadi yang dekat dengan pengusaha dan yang bekerja di sektor-sektor yang berbiaya tinggi (Reeves Latour dan Morselli, 2017). Mengeluarkan dana yang lebih besar di bandingkan kandidat yang tidak memiliki koneksi semacam itu.

Dengan mempelajari masing-masing kandidat dari PPP dan PKS di Jawa Tengah pada pemilu 2024 yang berbeda secara ekonomi, penelitian lapangan ini telah mengeksplorasi secara rinci terkait perbedaan pola pembiayaan kampanye dalam segi penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dalam pembiayaan kampanye pada setiap masing-masing kandidat. Desain komparatif antar masing-masing kandidat dari PPP dan PKS di Jawa Tengah ini berfungsi untuk menghubungkan pendekatan ekonomi politik dengan topik-topik yang lebih umum dipelajari seperti dampak sistem pemilu dan peraturan kampanye terhadap pengeluaran kampanye.

Adapun komponen penting dari studi dengan pendekatan ekonomi politik ini, pengeluaran kampanye dikonseptualisasikan dalam bentuk jumlah total uang yang dikeluarkan para masing-masing kandidat per pemilih selama kampanye pemilu. Meskipun memberikan

perhatian pada pengeluaran operasional rutin, penelitian ini berfokus secara sempit pada pengeluaran pembiayaan kampanye masing-masing caleg partai Islam PPP dan PKS pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Hal ini mencakup semua pengeluaran uang yang dibuat untuk tujuan menumbuhkan dukungan elektoral, yang melibatkan kategori pengeluaran umum seperti iklan, rapat pertemuan kampanye, bujukan untuk memberikan suara termasuk suatu pembelian suara, logistik kampanye, infrastruktur kesehatan atau olahraga, staf kampanye, dan manajemen bilik suara. Meskipun berfokus pada pembiayaan kampanye, minat utama dari penelitian ini adalah perbedaan pola pembiayaan antar kandidat dari masing-masing partai PPP dan PKS di Jawa Tengah.

BAB III

LANDSCAPE JAWA TENGAH

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran penjelasan tentang konteks dimana penelitian ini dilakukan. Konteks ini berkaitan dengan penjelasan tentang kondisi geografis dan demografis, struktur sosial ekonomi masyarakat Jawa Tengah, dan struktur politik di Jawa Tengah yang meliputi, peta Partai Politik di parlemen, perolehan kursi partai politik di DPRD Jawa Tengah dan hasil Pemilihan Umum dari Tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 di Jawa Tengah.

A. Kondisi Geografis dan Demografis Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40' - 8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah. Istimewa Yogyakarta di Sebelah Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan.

Gambar 3.1



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Selain itu Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 2.138,51 km² sedangkan Kota Magelang merupakan daerah terkecil dengan luas 18,12 km².

Jawa Tengah secara geografis terletak di tengah pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di antara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta-Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang terbesar di hampir seluruh wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Gambar 3.2

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018

Selanjutnya, Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu perbukitan Rembang zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes). Gunung Sindoro (di Kabupaen Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus. Jenis tanah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol* yang terbesar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang terbesar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat*, *Asbes*, *Talk*, *Mika Leusite*, *Oker*, *Granit*, *Dasit*, *Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir *Kuarsa*, *Kaolin*, *Feldspar*, *Gips*, *Bentonite*, *Batuapung*, *Trass*, *Diatome*, *Marmer*, Batu gamping, *Dolomit*, *Basal*, *Andesit*, *Tanah Liat*, *Pasir*, *Tanah urug*, *Kalsit*, *zeolit*, *Sirtu*, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Provinsi Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan, yakni daerah Rembang, Blora, Grobogan yang merupakan penghasil utama kayu jati. Provinsi Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Kabupaten Cilacap terdapat industri semen. Kota Solo, Kota Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa Klasik. Blora Cepu di Pinggiran Kabupaten Blora (Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi dikenal sebagai daerah tambang minyak (Kemendagri, 2015).

Sedangkan kondisi demografi menurut RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2026 terjadi satu sensus penduduk yaitu Sensus Penduduk 2020. Hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa, naik sebesar 4,1 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk 2010 atau rata-rata sebanyak 400 ribu jiwa setiap tahun. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 sebanyak 37.032.410 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,17 persen meningkat 0,8 persen poin dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 0,37 persen.

Tabel 3.3

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per tahun(%)	Rasio jenis kelamin
2018	34.358.487	0,77	98,49
2019	34.552.331	0,76	98,49
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota

yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Selain 19 Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk di atas Provinsi Jawa Tengah, 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan dengan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu dari persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan peningkatannya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

B. Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat potensial dengan karakteristik ekonomi yang berpotensi menumbuhkan perekonomian nasional. Pertama, provinsi dengan jumlah

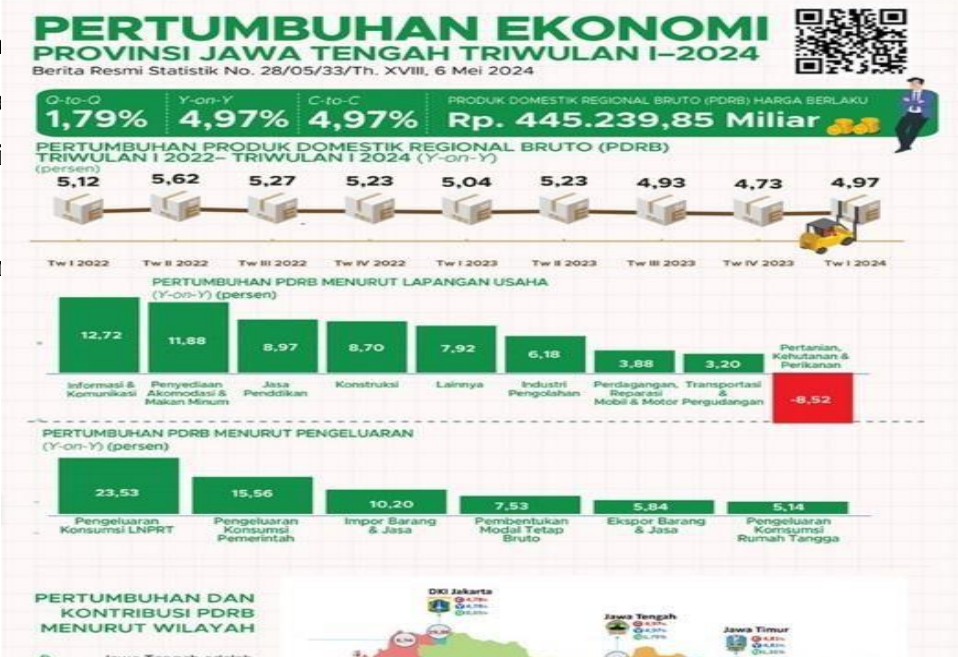
penduduk terbesar ketiga di Indonesia ini berpotensi menarik investor. Kedua, Jawa Tengah mempunyai kontribusi ekonomi nasional keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontribusi ekonomi Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 8,26% pada tahun 2023. Pencapaian pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir positif pada level nasional. Sektor-sektor unggulan yang menumbang pembangunan nasional adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sebagai provinsi penyumbang ekonomi terbesar keempat di Indonesia, Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN).

Perekonomian suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya pertumbuhan pada faktor produksi. Dalam peningkatan faktor produksi ini yang kemudian disebut pertumbuhan ekonomi. Jawa Tengah dalam periode 2014-2019 mempunyai pertumbuhan ekonomi diatas 4% dan kinerja ekonomi di atas kinerja ekonomi nasional. Dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi bahwasanya kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah tahun Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun sebesar minus 2,65 persen. Penurunan ini juga terlihat pada PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

semakin meningkat. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Apalagi dengan adanya vaksinasi yang sudah merata di seluruh wilayah Jawa Tengah, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto



ini sudah menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Apalagi dengan adanya vaksinasi yang sudah merata di seluruh wilayah Jawa Tengah, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Pada gambar 3.2 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah triwulan I Tahun 2024. Pada triwulan I capaian ekonomi Jawa Tengah tercatat positif yaitu sebesar 4,97 persen, dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan pengusaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar 16,0 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga yaitu sebesar 23, 53 persen. Dibandingkan dengan triwulan 4 2023 ekonomi Jawa Tengah dengan triwulan I 2024 tumbuh 1,9 persen.

Selanjutnya, terkait penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Tengah. PUK pada bulan Februari 2024 sebanyak 29,56 juta orang, meningkat sebanyak 0,44 juta orang dibandingkan Februari 2023. PUK yang angka kerja tercatat sebanyak 21, 35 juta orang (72,22%), sedangkan sisanya termasuk dalam bukan angka kerja sebanyak 8,21 juta orang (27,78%)(Tabel 3.5).

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri atas 20,41 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,9 juta orang pengangguran. Kemudian, apabila dibandingkan dengan komposisi Februari 2023, terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 0,28 juta orang. Peningkatan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan pada periode sebelumnya (Februari 2022-Februari 2023) yang mencapai 0,31 juta orang. Jumlah penduduk bekerja juga

mengalami penambahan sebanyak 0,45 juta orang pada Februari 2024. Jumlah pengangguran tercatat justru mengalami pengurangan sebanyak 0,17 juta orang pada Februari 2024. Pengangguran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan yang terjadi pada Februari 2023, yaitu sebanyak 0,09 juta orang.

Tabel 3.5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2022-Februari 2024

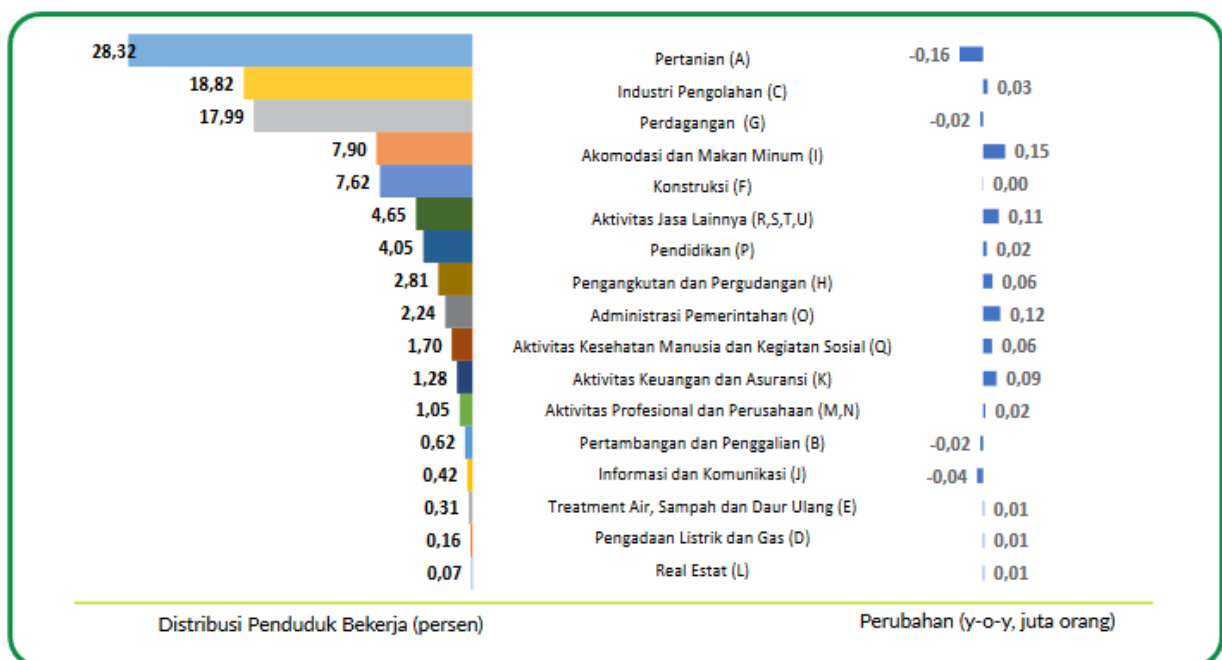
Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2023		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	28,82	29,12	29,56	0,31	1,07	0,44	1,50
Angkatan Kerja	20,76	21,06	21,35	0,31	1,47	0,28	1,34
Bekerja	19,57	19,96	20,41	0,39	2,02	0,45	2,25
Pengangguran	1,19	1,10	0,94	-0,09	-7,43	-0,17	-15,09
Bukan Angkatan Kerja	8,06	8,06	8,21	0,00	0,02	0,15	1,91
	persen	persen	persen		persen poin		persen poin
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,04	72,33	72,22		0,29		-0,11
Laki-laki	84,44	85,54	84,13		1,09		-1,41
Perempuan	59,64	59,12	60,30		-0,51		1,18

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Kemudian Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024 penduduk Jawa Tengah mayoritas bekerja dalam bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,32 persen, Industri pengolahan sebesar 18,82 persen, dan

Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,99 persen (Gambar 3.6). Jika dibandingkan dengan Februari 2023, tiga kategori lapangan pekerjaan mengalami peningkatan terbesar antara lain kategori Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial serta aktivitas jasa lainnya. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan, terbesar dibanding Februari 2023 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 0,16 juta orang.

Gambar 3.6 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2024



Sumber :Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Pada Februari 2024, sebagian besar penduduk yang bekerja berstatus buruh/

Gambar 3.7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerja Utama



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Disisi lain, peneliti juga melihat terkait adanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tingkat terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya paskan tenaga kerja di suatu daerah. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 4,39 Persen. Hal ini di anata 100 orang angkatan kerja elah ditemukan sekitar empat orang pengangguran. Pada Fenruari 2024, TPT sendiri telah turun sebesar 0,85 persen poin dibandingkan Februari 2023. TPT mempunyai tren yang terus menurun sejak Februari 2022 hingga Februari 2024.

Gambar 3.8 Karakteristik Pengangguran, Februari 2022-Februari 2024

Karakteristik Pengangguran	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2023	Perubahan Feb 2023-Feb 2024
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,75	5,24	4,39	-0,51	-0,85
TPT Menurut Jenis Kelamin					
Laki-laki	6,88	6,31	4,85	-0,58	-1,46
Perempuan	4,14	3,70	3,75	-0,44	0,05
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
Perkotaan	7,48	6,89	5,02	-0,60	-1,87
Perdesaan	3,99	3,55	3,67	-0,43	0,12

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 4,85 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan sebesar 3,75 persen. Dibandingkan dengan Bulan Februari 2023, TPT laki-laki memiliki pola penurunan yang sama dengan TPT Jawa Tengah, yang turun sebesar 1,46 persen poin sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,05 persen poin. Pada Bulan Februari 2024, TPT perkotaan lebih tinggi dibanding TPT di daerah pedesaan. Namun, jika dibandingkan dengan Bulan Februari tahun 2023, TPT di perkotaan mengalami penurunan. Sebaliknya, TPT di pedesaan mengalami peningkatan.

C. Struktur Politik di Jawa Tengah

Dalam catatan sejarah politik, dinamika politik di Provinsi Jawa Tengah telah diwarnai oleh kekuatan politik dari partai politik nasionalis. Kondisi seperti ini tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat Jawa Tengah, meskipun mayoritas masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah beragama Islam yang masih sering mencampurkan ajaran Islam dengan tradisi-tradisi lokal atau adat istiadat yang sudah ada sebelumnya. Di Jawa Tengah mayoritas yang beragama Islam sering dianggap sebagai bentuk Islam yang fleksibel dan tidak terlalu ketat dalam penerapan ajaran-ajaran syariat Islam, namun sering kali melibatkan ritual-ritual yang lebih berfokus pada aspek budaya dan sosial seperti selamatan, sedekah, dan upacara adat yang dikaitkan dengan pariwisata-pariwisata kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian (Geertz, C., 1963).

Selanjutnya, kekuatan politik ini telah ditemukan dengan kemenangan PDI Perjuangan pada waktu mulai tahun 2004-2019. Dalam kurun waktu ini PDI Perjuangan hanya sekali mengalami penurunan suara dan kekalahan, yaitu pada pemilu 2009 dari Pemilu sebelumnya

2004 mendapatkan 31 kursi di DPRD Jawa Tengah, posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar mendapatkan 18 kursi, disusul Partai PKB yaitu 15 kursi, PPP 10 kursi, PAN 10 kursi, Partai Demokrat 9 kursi, dan PKS mendapatkan 7 kursi. Sedangkan 17 Partai Politik lainnya terpaksa gigit jari dan perolehan suara untuk DPR RI juga tidak begitu banyak berbeda. Data lebih detail terkait peta politik di Jawa Tengah dapat dilihat dari perolehan kursi DPRD Jawa Tengah oleh partai politik oleh pemilu 2004 hingga pemilu 2024 yang dapat disimak pada tabel 3.4 di bawah.

No	Partai Politik	Jumlah Kursi di DPRD				
		2004	2009	2014	2019	2024
1.	PDI Perjuangan	31	23	27	42	33
2.	Partai Golkar	18	11	10	12	17
3.	Partai Demokrat	9	16	9	5	7
4.	PAN	10	10	8	6	4
5.	PKS	7	10	10	10	11
6.	PKB	15	9	13	20	20
7.	PPP	10	7	8	9	6
8.	Partai Gerindra	-	9	11	13	17
9.	Partai Hanura	-	4	-	-	-
10.	Partai Nasdem	-	-	4	3	3
11.	PSI	-	-	-	-	2
Jumlah Anggota		100	100	100	120	120

Sumber : KPUD Jawa Tengah

Namun demikian, kemenangan PKS dan PPP mengalami penurunan dari tahun ketahun sejak pemilu 2004 hingga 2024, yang di mana PPP sangat mengalami kemerosotan dari Pemilu 2019 telah kehilangan 2 kursi pada Pemilu 2024, yaitu cuma mendapatkan 6 kursi saja. Sedangkan dari PKS sendiri perolehan kursi dari tahun ketahun relatif stabil bahkan pada Pemilu 2024 mendapatkan kursi lebih banyak yaitu 11 kursi. Selanjutnya PDI Perjuangan sejak Pemilu 2004 hingga 2024 telah mendapatkan perolehan kursi yang cukup tinggi di atas 20 kursi.

Pada PKS perolehan jumlah kursi dari 3 kali pemilu dari pemilu 2009, 2014, dan 2019 telah berhasil mendapatkan ten seats berturut-turut. Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja dan daya tarik

PKS di kalangan pemilih Jawa Tengah bahwa PKS memiliki basis pemilih yang relatif stabil, terutama dikalangan masyarakat yang lebih religius dan konservatif, serta kelompok yang mendukung ideologi partai yang lebih cenderung kepada nilai-nilai Islam. Di Jawa Tengah, daerah dengan basis pemilih yang cukup religius dan dengan pengaruh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, PKS dapat memperoleh dukungan dari pemilih yang memiliki preferensi politik serupa.

Namun, meskipun dari PKS memiliki basis yang komitmen, jumlahnya yang signifikan, karena dari PKS cenderung terfokus pada segmen pemilih tertentu tanpa memperluas basis dukungan ke kelompok-kelompok pemilih lain yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun stabil, perolehan kursi dari PKS tidak banyak berkembang namun mendapatkan perolehan kursi yang komitmen. Pada pemilu 2009, 2014, dan 2019 PKS harus bersaing ketat dengan partai-partai lain yang memiliki jaringan yang lebih luas dan lebih dikenal dengan masyarakat, seperti PDI-P, Golkar, PKB, Gerindra, dan Demokrat. Dari penelitian yang ada PDI-P dan PKB adalah dua kekuatan utama yang sangat dominan, sementara dari partai-partai baru yang lebih berfokus pada nasionalisme dan isu sosial ekonomi (sepertinya Gerindra) mulai mendapatkan perhatian besar dari pemilih.

Sedangkan peneliti membaca beberapa literatur bahwasanya di lihat dari jumlah kursi nasional PPP di Pemilu tahun 2019 dilihat dari ketua umumnya yaitu Romahurmuziy atau yang dikenal dengan Romi. Beliau telah memimpin PPP selama periode tersebut hingga 2020, karena beliau terjerat kasus dan akhirnya digantikan oleh Muhammad Mardino sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Namun pada tahun 2019 PPP telah berhasil mendapatkan 19 kursi di DPR RI, yang menandakan sedikit peningkatan dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014, jumlah kursi DPRD PPP juga tidak selisih jauh dengan nasional yaitu pada Pemilu tahun 2014 telah mendapatkan 8 kursi dan di Pemilu tahun 2019 mendapatkan 9 kursi. Namun dari PPP masih berada di bawah target yang mereka harapkan.

Selanjutnya dari PDI-P dilihat dari perolehan kursi Pemilu 2019 yang memperoleh 42 kursi, namun di Pemilu tahun 2024 mendapatkan 33 kursi, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor preferensi dari pemilih, terutama pemilih muda. Pemilih muda yang lebih banyak terpapar oleh informasi digital dan cenderung lebih progresif dalam pandangan politiknya mungkin lebih tertarik pada partai yang menawarkan kebijakan yang lebih modern atau lebih dinamis dan dengan semakin banyaknya pilihan partai

politik yang muncul, pemilih terpecah dan tidak terfokus hanya pada partai besar seperti PDI-P. Pemilih yang sebelumnya PDI-P karena pilihan tunggal kini memiliki banyak alternatif termasuk partai-partai menawarkan kebijakan lebih relevan dengan kebutuhan mereka.

PDI-P pada kinerja presiden Joko Widodo yang di tingkat pusat maupun di beberapa daerah, kinerja pemerintahan pusat atau daerah yang dipimpin oleh PDI-P tidak memuaskan rakyat atau ada isu-isu penting yang tidak terselesaikan (misalnya masalah ekonomi, pengangguran, atau ketimpangan sosial) hal ini dapat mempengaruhi persepsi pemilih terhadap partai tersebut. Selanjutnya partai baru juga menjadikan agresif dalam menarik perhatian pemilih, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gelora, dapat menyebabkan terpecahnya suara dikalangan pemilih pemuda. PDI-P, meskipun merupakan partai besar pemilihnya yang lebih mencari alternatif dengan pendekatan yang lebih segar.

Dengan menyajikan data di atas, penulis hendak menunjukkan bahwa hingga 20 tahun reformasi kekuatan partai yang beraliran Islam, khususnya PPP dan PKS adalah partai yang memiliki ideologi Islam dan berbasis Islam. Partai Islam dalam kajian ini dipahami sebagai partai yang berideologi Islam dan basisnya memilih masyarakat yang beragama Islam.

BAB IV

PROFIL KANDIDAT PPP DAN PKS (ANGGOTA DPRD JAWA TENGAH)

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran penjelasan tentang konteks di mana penelitian ini dilakukan. Konteks ini berkaitan dengan penjelasan tentang profil latar belakang, visi misi terbentuknya PPP dan PKS maupun profil 6 kandidat, 3 kandidat dari masing-masing partai.

A. Profil Partai Persatuan Pembangunan

Pada masa Orde Baru tidak ada partai yang berkuasa penuh kecuali partai pemerintah. Pada dasarnya dari pemimpinnya pun ragu untuk menyebut dirinya partai politik, melainkan hanya menyebutnya sebagai golongan. Dua partai yang ada pada masa ini yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dijadikan sebagai pelengkap demokrasi saja. Pada masa ini PPP tidak banyak yang bisa dilakukan karena pada saat masa ini kepemimpinan otoritarianisme terasa benar adanya, yang dimana seluruh sektor organisasi politik dalam pengawasan dan organisasi masanya pun demikian. PPP pada masa ini hanya bisa dilihat sebagai wadah berkumpulnya aspirasi umat Islam saja. Dalam naskah deklarasi pembentukan PPP yang digagas dan ditanda tangani oleh petinggi Nadhlatul Ulama, Parmusi, PSII dan Perti sepertihalnya KH. Idham Khalid, H.M.S Mintaredja, H. Anwar Tjokroaminoto, Rusli Halil dan K.H Masykur dikatakan bahwa PPP lahir sebagai wadah peneylambat aspirasi umat Islam dan cermin serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat untuk bersatu membina masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melauai perjuangan politiknya.

Pada dasarnya PPP pada masa Orde Baru ini tidak lebih dari sekedar “aksesoris” saja namun aspirasi dan pandangan umat Islam serta umat lainnya sangat nyata dalam aturan-aturan hukum. Sehingga negara dalam hal pemerintahan bisa bebas menintervensi terkait kehidupan politik seperti internal partai politik. Akibat dari hal tersebut maka PPP tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik. Gambaran dari partai politik dalam buku pengantar politik berbeda dengan realitas kehidupan pasrtai politik di masa Orde Baru.PPP ini patut diberikan apresiasi karena pada masa Orde Baru berani menyuarakan pembatasa masa jabatan presiden tidak lebih dari dua periode supaya sirkulasi dari kepemimpinan dapat terjaga dengan baik, demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat. Disisi lain juga bahan kritikan kepada pemimpin orde baru seperti halnya pengembangan ekonomi kerakyatan, penegakan hukum dan keadilan, pembrantasan KKN, otonomi daerah, pemerataan pembangunan, pemeberantasan perjudian beratas namakan sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) dan penghapusan atas tunggal yang disuarakan kader PPP dalam forum.

Dalam sejarah Indonesia, Orde Baru dianggap sebagai rekonstruksi Orde Lama. Yang diana pada saat Soekarno lengser, Soeharto tampil sebagai sosok yang mampu menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Hal ini telah dilakukan semata-mata ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga PKI telah dianggap sebagai Partai terlarang sehingga pada saat itu harus diha.pus dan dibubarkan

Orde Baru hanyalah legitimasi Soeharto untuk memperkuat kedudukannya dalam pemerintahan Indonesia. Sehingga pada saat lahirnya supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1996) menandakan dimulainya rezim Orde Baru. Menurut Soebadio Sastrosatomo, supersemar merupakan kudeta Soeharto atas pemerintahan Soekarno. Supersemar dijadikan sebagai formalitas jatuhnya rezim Orde Lama. Seperti yang dikatakan oleh Soeharto, “Runtuhnya rezim Orde Lama terjadi melalui mekanisme yang konstitusional.”

Dalam hal politik selama perjalanya di tahun 1966-1971, Orde Baru dipimpin oleh Angkatan Darat sebagai inti lembaga militer Pertahanan dan Keamanan (Hankam) memiliki andil yang menonjol dan memutuskan dalam proses politik Bahkan Soeharto menjadikan Hankam sebagai “komite sentral” yang mengendalikan komando-komando teritorial yang masuk dalam aparat birokrasi sipil dan mengontrol Golkar, partai-partai lain maupun kelompok-kelompok kepentingan.

Dalam hal demokrasi bahwasanya Orde Baru telah menempatkan negara sebagai aktor tunggal dan sentral. Hal ini hanya dilakukan untuk kepentingan pembangunan dan politik. Dari sinilah pola egaliter dan demokratik terpinggirkan dan digantikan dengan pola feodalistik yang dimungkinkan karena dua hal yaitu melalui integritas, pembersihan serta penyatuan birokrasi negara dan militer dibawah satu komando dan dilakukan melalui upaya penyingkiran politik massa.. Pada masa Orde Baru adalah sentralisasi peran negara yang diumpamakan melalui Soeharto, MPR, DPR, Pers, Partai Politik, Ormas dan hampir semua lembaga sosial politik kenegaraan yang dibelenggu secara tersusun dibawah kekangan negara oleh Soeharto, adapun perwujudan tersendiri demokrasi yaitu pemilu. Pemilu pada masa Orde Baru telah diselenggarakan sebanyak enam kali yaitu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama pada masa Orde Baru yang dilaksanakan secara serentak dan pada saat tahun itu juga Soeharto melakukan penyederhanaan terhadap fraksi-fraksi yang ada di DPR hasil pemilihan umum.

Pada masa Orde Baru dikenal sebagai fusi partai politik, maka pada masa Orde Lama ada namanya Partai Gurem yang diartikan sebagai partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi atau partai yang tidak jelas power base nya. Sehingga pada saat itu partai gurem sendiri lama kelamaan akan hilang dan partai yang berhasil meraih kursi telah melakukan penggabungan-penggabungan dalam pembentukan fraksi.

1. Terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan

Kebijakan Soeharto tentang fusi partai politik menjadi tolak ukur terbentuknya PPP. Partai yang dibentuk pada 5 Januari 1973 dari gabungan partai-partai politik Islam pada masa Orde lama yang mampu mengantarkan masa kejayaan dalam sejarah pemilu Indonesia. PPP merupakan fusi dari 4 partai politik Islam. Diantaranya yakni Partai NU (Nadhlatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Serekat Islam Indonesia) dan PERTI (Partai Persatuan Tarbiyah Islam). Selain dari partai PPP, dari partai PDI atau yang sekarang dikenal dengan nama PDI Perjuangan adalah partai politik yang tergabung dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Pakindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).

Berdirinya PPP tidak lepas dari deklator seperti halnya Ketua umum PB Nadhlatul Ulama, KH Idham Chalid, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), H. Mohammad syafa'at Mitaredtja, Ketua Umum PSII, H. Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PERTI, H. Rusli Halil, dan ketua kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR, H. Masykur. Lima deklator itulah yang menandatangani perndirian PPP Beliau adalah ulama-ulama dan sekaligus politikus muslim yang masyur memiliki integritas dan moral politik yang tinggi sehingga pengabdian beliau lebih condong pada kepentingan bangsa dan agama, bukan kepada kepentingan kelompok. Dengan begitu kekhawatiran akan terjadinya konflik internal dan membawa perpecahan di dalam partai yang akibat dari beberapa fusi partai politik Islam dapat terbandung.

Visi PPP adalah 'Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman'.

Dalam bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1. Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; 2 pentingnya peran agama Islam sebagai panduan moral dan sumber inspiratif dalam kehidupan kenegaraan; 3 paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas dan lokalitas keindonesia, dan 4 komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas

kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik demokrasi di Indonesia dan berakhlakul karimah.

PPP sendiri telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia HAM, menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PPP telah berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program Pembangunan kesejahteraan telah diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan yang diharapkan lahirnya manusia Indonesia yang cerdas,ampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Sedangkan Misi Partai Persatuan Pembangunan antara lain:

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang bertakwa dan beriman dan kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan dalam beragama, mengembangkan persaudaraan sesama muslim “Ukhuwah Islamiyah”. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya paham – paham “atheisme, leninisme, marxisme, komunisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia”.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai – nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan persaudaraan sesama manusia “Ukhuwah Basyariyah”. Dengan demikian PPP menentang dan mencegah berkembangnya neo – neofeodalisme, yaitu paham – paham yang “melecehkan martabat manusia, diskriminasi, proses dehumanisasi, dan budaya kekerasan”.
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, memperkuat dan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dengan mengembangkan

persaudaraan sebangsa “Ukhuwah Wathaniyah”. Dengan demikian PPP menentang dan mencegah proses disintegrasi, konflik sosial dan perpecahan yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan serta mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Dengan demikian PPP menentang dan mencegah setiap bentuk “hegemoni, kediktatoran, fasisme, otoritarianisme, dan kesewenang – wenangan yang mendzalimi rakyat”.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai bentuk upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, “Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur”. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk “hedonistis, permisif, matrealistis, pola kehidupan yang konsumeristis, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan budaya di tengah – tengah kehidupan masyarakat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan”.

PPP berdasarkan ‘Islam dengan bercirikan *Ahlussunnah Wal Jama’ah*, dan bersifat nasional”. Berikut adalah lambang dari Partai Persatuan Pembangunan beserta maknanya :



Gambar 4.1 Logo Partai Persatuan Pembangunan

- a. Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam
- b. Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta merupakan sumber motivasi dan inspirasi untuk menegakkan ajaran agama Islam dalam segala bidang kehidupan
- c. Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4(empat) sama sisi berwarna kuning emas.

Dari identitas dan analisis di atas terdapat unsur dalam perancangan logo yaitu menggunakan representasi simbol Ka'bah. Logo tersebut juga menggunakan beberapa warna yaitu warna hitam, kuning dan hijau.

a. Pemaknaan Tingkat Denotatif

tingkat denotatif, proses signifikasi ini biasanya mengacu kepada penggunaan baga maupun arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Pemaknaan dilakukan berdasarkan apa yang ditangkap oleh indera yang aktif di dalam tubuh, dalam hal ini berupa indera penglihatan.

Jadi secara denotatif apa yang ditangkap oleh indera secara visual dan nyata tanpa ada penambahan makna lain. Dalam logo Partai Persatuan Pembangunan dengan susunan logo tersebut terdapat simbol Ka'bah di bagian tengah, kemudian tulisan akronim "PPP" dibawahnya dengan menggunakan warna hijau sebagai background.

b. Pemaknaan Tingkat Konotatif

Pada pemaknaan konotatif, makna dari logo dapat dinilai secara subjektif dimana sudah mulai ada pergeseran dari makna umum (denotatif) karena sudah ada penambahan arti dari nilai-nilai tertentu. Pada pemaknaan denotasi sudah di jabarkan unsur-unsur yang membentuk logo tersebut.

Pemaknaan konotatif dari logo Partai Persatuan Pembangunan tersebut dapat dimaknai bahwa, Ka'bah adalah sebuah bangunan di tengah-tengah masjid di Makkah (Arab Saudi). Dan dibawah simbol Ka'bah terdapat akronim "PPP" kepanjangan dari Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan identitas dari partai tersebut.

Warna merupakan salah satu elemen yang memegang peran penting dalam menciptakan kesan atau suasana. Dalam logo Partai Persatuan Pembangunan ini menggunakan tiga warna, yaitu; Warna hitam memiliki makna kekuatan, ketangguhan,

otoritas, dan rasa percaya diri. Warna kuning memiliki makna kebahagiaan, keceriaan, dan optimisme. Dan warna hijau memiliki makna kehidupan, kesuburan, dan kekayaan.

c. Mitos

Mitos dimaknai sebagai suatu operasi ideologi yang berkembang dalam masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun. Mitos merupakan suatu hal yang diyakini kebenarannya walaupun kebenarannya tidak dapat dibuktikan.

Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan mitos yang berkembang diyakini dalam kebudayaan di Indonesia, penggunaan Ka'bah dalam logo tersebut merupakan simbol pemersatu umat Islam, karena umat Islam di seluruh dunia menghadap Ka'bah sebagai titik ketika akan melakukan ibadah (Sholat). Sedangkan akronim "PPP" kepanjangan dari Partai Persatuan Pembangunan merupakan identitas utama dari partai politik itu sendiri.

Lalu untuk warna-warna yang digunakan dalam logo Partai Persatuan Pembangunan adalah; Warna hitam melambangkan simbol ketegasan dalam perjuangan dalam hal ini memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Warna kuning melambangkan simbol harapan untuk berjaya, makmur, dan sejahtera. Dan warna hijau melambangkan simbol kehidupan, kemakmuran, dan kekayaan yang berarti Partai Persatuan Pembangunan ingin memberikan kehidupan yang maju memiliki status sosial yang sukses.

B. Profil Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah nama sebuah partai Islam di Indonesia. Sebelum menjadi PKS, PK adalah nama partai yang telah dibentuk pada tahun 1998. Selanjutnya nama PK berubah menjadi PKS, karena tidak memenuhi *electroral threshold*. PKS ini telah didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, 9 Jumadil Awwal yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2002. Partai ini berasaskan Islam. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah Islam, dikatakan sebagai partai dakwah karena pembentukan partai karena niat awalnya untuk tugas dakwah di bidang politik (ADARTD PKS, 2009). Partai PKS ini telah mengusung ciri yaitu sebagai partai yang bersih, peduli dan profesional. Sebagai partai yang didirikan di Indonesia, PKS memiliki visi menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun misi Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadikan Partai sebagai sarana

perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah SWT dalam keutuhan Negara Republik Indonesia (AD-ART PKS, 2009).

Tujuan didirikannya Partai Keadilan Sejahtera yang telah tertuang dalam AD/ART, adalah “Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Partai Keadilan Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang dilalui oleh garis khatulistiwa di dalamnya (platform PKS, 2008).

Masyarakat Madani yang dimaksud adalah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara (Suroto, 2015). Pengertian genuin dari Masyarakat Madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam *ukhuwah Islamiyyah* (ikatan keislaman), *ukhuwah wathaniyyah* (ikatan kebangsaan), dan *ukhuwah basyariyyah* (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI. Jadi sangat jelas posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam wacana bentuk Negara atau hubungan antara agama-negara. Bentuk negara dan hubungan agama-negara yang realistis-obyektif untuk Indonesia dengan pluralitas dan keimanan penduduknya adalah Masyarakat Madani, NKRI Yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam negara dijamin kebebasan pemeluknya untuk beriman secara tauhid, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara subyektif Partai Keadilan Sejahtera memiliki *hajm ma'nawi* (kapasitas moral), *hajm fikri* (kapasitas idealita), *hajm ijtima'i* (kapasitas sosialkemasyarakatan), *hajm ta'tsiri* (kekuatan pengaruh), *hajm siyasi* (kapasitas politik), sehingga dakwah mampu secara struktural memberikan pengaruh (*melalui public reason*). (Platform PKS, 2008).

Partai Keadilan Sejahtera awalnya adalah Partai Keadilan (PK), yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998. Partai Keadilan lahir dalam momentum euphoria refoemasi setelah lengsernya Soeharto tahun 1998. Partai ini adalah partai yang berbasis gerakan Tarbiyah model Ikhwatun Muslimin di Mesir. Tokoh utamanya adalah Hasan Al-Banna (Mawardi, 2013).

Dilihat dari sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera, kelahiran PKS dapat dibagi menjadi tiga tahapan. *Pertama* fase dakwah kampus. Para aktivis umumnya usia

muda yang bergerak dari dalam kampus (umumnya universitas umum) dan dalam skala terbatas di sekolah-sekolah dalam bentuk Rohani Islam (Rohis). Mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut adalah sama, yakni memberikan pemahaman dasar-dasar Islam dengan penekanan pada penanaman *ghirah* (semangat) keislaman. *Kedua* adalah pelembagaan gerakan mahasiswa. Pada perkembangannya, LDK semakin berkembang terutama di kampus-kampus umum, dan beberapa kampus Islam namun hanya sedikit. Masjid-masjid kampus menjadi pusat kegiatan dakwah, dan dihadiri banyak mahasiswa untuk ikut serta dalam lingkaran kecil kajian agama (*halaqoh*). Sehingga pada pertemuan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), beberapa aktivis LDK mengumumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI). *Ketiga* adalah gerakan politik. Gerakan politik ini dimotori oleh para aktivis KAMMI, alumni LIPIA, alumni Saudi Arabia dan alumni Timur Tengah lainnya (Rokhmad, 2013).

Selanjutnya visi Partai Keadilan Sejahtera yaitu menjadi partai, pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Misinya adalah menjadikan Partai Keadilan Sejahtera menjadikan partai sebagai sarana mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat yang telah diridhai Allah SWT dalam keutuhan Negara Kesatuan Republi Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera berasaskan' Islam, serta bercirikan bersih, peduli dan profesional. Berikut adalah lambang Partai Keadilan Sejahtera beserta maknanya :



Gambar 4.2 Logo Partai Keadilan Sejahtera

- a) Kotak persegi empat melambangkan “kesatuan arah, persatuan, keserasian, keteraturan, dan kesetaraan”.
- b) Bulan sabit melambangkan “dimensi waktu, kejayaan, pencerahan, keindahan, dan kesinambungan sejarah”.
- c) Untaian 17 (tujuhbelas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan “ukhwah, istiqamah, adil, berani disiplin dalam menjalankan tugas, serta dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan”.
- d) Putih melambangkan “mulia, bersih, dan suci”.
- e) Hitam melambangkan “akomodatif, kepastian, dan aspiratif”.
- f) Kuning emas melambangkan “kejayaan, kebahagiaan, dan kecemerlangan”.
- g) Tulisan “PKS” dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Dari identitas yang ada bahwasannya terdapat analisis maupun unsur-unsur dalam perancangan logo, yang menggunakan representatif simbol padi dan bulan sabit Logo tersebut telah menggunakan beberapa warna yaitu kuning, hitam, dan putih.

a. Pemaknaan Tingkat Denotatif

Pada tingkat pemaknaan denotatif, proses signifikansi mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Pemaknaan dilakukan berdasarkan apa yang ditangkap oleh indera aktif didalam tubuh, dalam hal ini berupa indera penglihatan. Jadi secara denotatif, apa yang ditangkap oleh indera secara visual dan nyata tanpa ada penambahan makna lain. Dalam logo Partai Keadilan Sejahtera terdapat susunan elemen logo yang digunakan, yaitu terdapat simbol 17 butir padi pada tangkai tegak lurus yang diapit oleh 2 bulan sabit yang saling membelakangi. Kemudian terdapat akronim “PKS” dibawahnya, pada logo ini menggunakan warna hitam sebagai background.

b. Pemanaan Tingkat Konotatif

Pada pemaknaan konotatif makna dari logo dapat dinilai secara subjektif dimana mulai terjadi pergeseran dari makna umum (denotatif) karena sudah ada penambahan arti dan nilai-nilai filosofi tertentu. Pemaknaan konotatif dari logo Partai Keadilan Sejahtera tersebut dapat dimaknai bahwa 17 butir padi melambangkan pangan/padi yang akan menjadi beras yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Simbol bulan sabit melambangkan dimulainya fase baru bulan atau merujuk pada sebuah perubahan. Pada logo tersebut terdapat tulisan “Partai Keadilan Sejahtera dan akronim “PKS” yang merupakan identitas dari partai tersebut. Warna merupakan aspek

paling mudah diingat oleh manusia, karena warna menjadi bentuk komunikasi non verbal yang bisa mengungkapkan pesan. Dalam desain logo Partai Keadilan Sejahtera menggunakan 3 warna, yaitu; Warna kuning memiliki makna kebahagiaan, keceriaan, dan optimisme. Warna hitam memiliki makna ketegasan, kekuatan, otoritas, dan percaya diri. Dan Warna putih memiliki makna bersih, suci, dan murni.

c. Mitos

Mitos dimaknai sebagai suatu operasi ideologi yang berkembang dalam masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun. Mitos merupakan suatu hal yang diyakini kebenarannya walaupun kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan mitos yang berkembang dan diyakini dalam kebudayaan Indonesia. Simbol 17 butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan kesejahteraan dan keadilan, dan 17 nya diambil dari peristiwa kemerdekaan negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai perjuangan juga dapat dimaknai sebagai kewajiban umat Islam yaitu tujuhbelas rakaat shalat dalam sehari. Simbol bulan sabit tersebar sebagai identitas kultural Islam diseluruh dunia. Lalu untuk warna-warna yang digunakan dalam logo Partai Keadilan Sejahtera adalah; Warna kuning melambangkan simbol harapan untuk berjaya, makmur, dan sejahtera. Warna hitam melambangkan simbol ketegasan dalam perjuangan dalam hal ini memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Warna putih melambangkan simbol kemurnian, kesucian, dan bersih dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi partai politik yang jujur dan amanah.

C. Profil Kandidat DPRD Jawa Tengah PPP

Dalam poin ini penulis akan membahas mengenai profil 3 kandidat yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Anggota ini tidak hanya memiliki integritas yang tinggi, tetapi juga memiliki visi dan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya dalam sektor keagamaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah. Berikut visi misi dan profil kandidat :

1. H. Nurul Furqon, S.E,M.M.

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 14 April 1972

Karir : - Ketua Komunitas Jeep Trail Kalijogo Demak (2010-2017)

- Sekertaris BPC GAPENSI Demak (2002-2018)
- Ketua HIPMI Demak (2006-2009)
- Wakil Ketua KADIN Jateng (2009-Sekarang)
- Wakil ketua GMPI Demak (2010-2015)
- Pembina GMPI Kab. Demak (2017-2022)
- Ketua PW GMPI Jawa Tengah (2021-2026)

Karir Partai

- : - Anggota DPRD Jawa Tengah (2018-2019)
- Anggota DPRD Jawa Tengah (2019-2021)
 - Sekertaris DPC PPP Kab. Demak (2010-2021)
 - Wakil ketua DPC PPP Kab. Demak (2000-2010)
 - Wakil ketua DPW PPP Jawa Tengah (2021-2026)

Riwayat Pendidikan:- Beliau menempuh pendidikan di Qudsiyah Kudus dari MTS(1954) hingga MA (1992). Kemudian hijrah ke Malang mengambil jurusan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang hingga tahun 1997, pada tahun 2018 melanjutkan S2 manajemen di Universitas 17 Agustus Semarang hingga tahun 2021.

- Pendidikan Nin Formal dari kecil H Nurul Furqon berada dilingkungan agamis dengan menempuh pendidikan madin hingga MTD belajar di pesantren Amukti Baletengahan, Kabupaten Kudus.

Visi misi : Satu tujuan menjemput kemenangan

2. M. Ali Wafa

Merupakan Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terpilih dan termasuk Caleg baru dari PPP, beliau dari Dapil Jawa Tengah 4 yaitu wilayah pemilih Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati dengan memperoleh suara 78.101 suara. M. Ali Wafa mempunyai program Jawa Tengah turun kemiskinan dan juga pernah menjadi Ketua PT. Surya Tour Hidayah pada tahun 2020-2023.

3. Dr Hj. Sholeha Kurniawati

Dr Hj. Sholeha Kurniawati Caleg yang jadi pada pemilu 2024, sebelumnya Ia juga sudah pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah PPP periode 2019-2024 dan termasuk sekertaris Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah juga sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah. Ia dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 wilayah pemilihan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga. Ia mempunyai program kesehatan tanpa kelas karena Ia seorang dokter jadi salah satu program yang Ia terapkan yaitu yang telah berhubungan dengan kesehatan. Ia lahir di Blora dan usia sekarang 55 Tahun, tempat tinggal sekarang di Kabupaten Semarang dan Ia pendidiks terakhir adalah S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Profil Kandidat DPRD Jawa Tengah PKS

Dalam poin ini penulis akan membahas mengenai profil 3 kandidat yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Anggota ini tidak hanya memiliki integritas yang tinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan latar belakang pendidikan yang solid dan pengalaman di bidang sosial serta visi yang jelas untuk pembangunan berkelanjutan di. Berikut visi misi dan profil kandidat :

1. H. Muhammad Afif, Lc.

H. Muhammad Afif, Lc lahir di Demak, 21 Mei 1966, Ia tinggal di Jalan RT 02 RW 02 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Semarang. Ia telah menempuh pendidikan SD di Demak, MTS-MA di Pondok Pesantren Ibrohimiyah Mranggen Demak, dan melanjutkan studi di Universitas Muhammad Ibnu Saud Saudi Arabia Cabang Jakarta (LIPIA), D3 bahasa arab, SI fakultas Syariah (Hukum Islam).

Ia juga sebagai pengasuh majelista iklim , Ketua DPW Jawa Tengah, dan wakil ketua DPRD Kota Semarang dan mempunyai program yaitu turun ke Dapil nyambung, nyapa, menyerap aspirasi kemudian menindaklanjutinya, Desa/ kelurahan binaan, dan advokasi masyarakat.

2. Hj Ida Farida, M.Pd.

Ia merupakan Caleg DPRD PKS yang terpilih di daerah pemilih 2 yaitu wilayah pemilih Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Ia memiliki program yaitu berkontribusi menghadirkan perda yang mengutamakan keluarga, perempuan, dan anak, selanjutnya bersama dengan eksekutif hadirkan program-program yang berpihak pada kebutuhan mendasar pada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga. Ia lahir di Semarang dan usia sekarang 57 Tahun, bertempat tinggal di Kota Salatiga. Ia menempuh pendidikan SMA di SPGN Salatiga, SI di IAIN Salatiga, dan S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ia juga aktif di bidang organisasi Salimah Jawa Tengah menjadi Ketua di Tahun 2005-2015, ketua IGTKI Kabupaten Semarang tahun 2011-2019, dan anggota BKOW Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020. Selanjutnya Ida Farida juga memiliki penghargaan di Dinas Pendidikan pada tahun 2007 dan 2013.

3. Much. Muchlis Ariston, S.T

Ariston lahir di Pekalongan dan usia sekarang beranjak 54 Tahun, Ia mempunyai riwayat pendidikan SMA di SMA Negeri Wiradesa melanjutkan D3 di YKPN Teknik Arsitektur dan S1 di Universitas Gajah Mada. Ia sebelumnya juga pernah bekerja sebagai asisten arsitek di PT Atelier 6 Banung, Direktur Archipan Konsultan, Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Dupan Mall, dan staff ahli bangunan kospin Jasa.

Selanjutnya Ariston juga aktif dalam organisasi sebagai bendahara umum DPD PKS Kota Pekalongan, Sekertaris DPD PKS Kota Pekalongan, dan ketua BPD PKS JATENG Dapil 13.

BAB V

POLA PEMBIAYAAN KAMPANYE KANDIDAT PPP DAN PKS DALAM SEGI PENERIMAAN , PENGELOLAAN DAN PENGELUARAN

Bagian bab ini peneliti akan menjelaskan terkait pola pembiayaan kandidat PPP dan PKS dalam segi penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran.

5.1 Gambaran Umum Pengeluaran Pendanaan Kampanye

Dana kampanye pemilihan umum diatur dalam PKPU 18/2023. Peraturan ini secara lengkap telah mengatur tentang dana kampanye pemilihan umum. Untuk mengetahui pengelolaan dana kampanye Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera peneliti menggunakan peraturan tersebut sebagai acuan PKPU 18/2023. Beberapa pasal antara lain Pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 35, pasal 36 dan pasal 43. Pasal-pasal ini berkaitan dengan peraturan dana kampanye.

Obyek penelitian ini adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada pembiayaan kampanye politik calon lembaga legislatif pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah telah mengimplementasikan peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa dewan salah satunya Bapak H. Nurul Furqon S.E.,M.M dalam uraian berikut :

“Kami melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Ya harus profesional kalau peraturanya itu ya itulah yang menjadi acuan kami, contohnya kami telah menempatkan dana kampanye sesuai dengan kebutuhan yang ada sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sesuai peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 dalam pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 35, pasal 36, dan pasal 43. Segala sesuatu itu pasti sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah jadi kami dan tim sukses mengikuti saja dengan arahan pemerintah”.

Hasil wawancara peneliti menunjukkan calon lembaga legislatif yang sudah jadi bahwa Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah telah mengelola dan mempertanggung jawabkan dana kampanye dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Bapak M Ali Wafa dalam uraian berikut :

“ Pemasukan harus sesuai sama dengan pengeluaran alias seimbang, pengeluaran yang di keluarkan kami untuk berkampanye dan jadi dewan ya kurang lebih

Rp3.000.000.000,00 . Ya pada umumnya setiap pengeluaran pasti ada data buktinya. Ya itu tadi, segala sesuatu harus sesuai dengan peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023. Kami transparan dan wajib transparan dalam hal keuangan”.

Tabel 5.1

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR
PPP Jawa Tengah Secara Umum

Nomor	Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
A.	PENERIMAAN	3.000.000.000		
1.	Partai Politik	0		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	3.000.000.000,00		Jasa dalam bentuk kampanye calon sebesar Rp. 3.000.000.000,00
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0		
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
6.	Lain-lain	0		
	a. Lain-lain Komitmen			
	b. Bunga Bank	0		
		Tabel Lanjutan		
B.	PENGELUARAN	3.000.000.000,00	0	
1.	Pengeluaran Operasi	3.000.000.00,00	0	
	a. Pertemuan Terbatas	0	0	
	b. Petemuan Tatap Muka	0	0	

	c. Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Elektronik	0	0	
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	0	0	
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	
	f. Rapat Umum	0	0	
	g. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	
	h. Lain-lain	3.000.000.000,00	0	
	1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPRD PPP Jawa Tengah	0	0	
	2. Jasa dalam Bentuk Kampanye Calon	3.000.000.000,00		

	Anggota DPRD PPP Jawa Tengah			
	3. Operasi Lain-lain	0		
2.	Pengeluaran Modal	0		
	a. Pembelian Kendaraan	0		
	b. Pembelian Peralatan	0		
3.	Pengeluaran Lain-lain	0		
	a. Pemberian Piutang	0		
	a. Pembayaran Utang	0		
C.	SALDO PER 26 NOVEMBER	0		
	Kas di rekening khusus	0		
	Kas di bendahara	0		
	Barang	0		
	Tagihan Kepada:	0		
	Utang	0		

Sumber : Partai Persatuan Pembangunan (2024)

Tabel 5.2 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum
Anggota DPR PKS Jawa Tengah Secara Umum

Nomor	Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
A.	PENERIMAAN	4.000.000.000		
1.	Partai Politik	0		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	4.000.000.000,00		Jasa dalam bentuk kampanye calon sebesar Rp. 4.000.000.000,00
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0		
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
6.	Lain-lain	0		
	c. Lain-lain Komitmen			
	d. Bunga Bank	0		
		Tabel Lanjutan		
B.	PENGELUARAN	4.000.000.000,00	0	
1.	Pengeluaran Operasi	4.000.000.00,00	0	
	i. Pertemuan Terbatas	0	0	
	j. Petemuan Tatap Muka	0	0	
	k. Pembuatan/Produksi Iklan di	0	0	

	Media Massa Cetak dan Elektronik			
	l. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	0	0	
	m. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	
	n. Rapat Umum	0	0	
	o. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang- undangan	0	0	
	p. Lain-lain	4.000.000.000,00	0	
	4. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPRD PPP Jawa Tengah	0	0	
	5. Jasa dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota	4.000.000.000,00		

	DPRD PPP Jawa Tengah			
	6. Operasi Lain-lain	0		
2.	Pengeluaran Modal	0		
	c. Pembelian Kendaraan	0		
	d. Pembelian Peralatan	0		
3.	Pengeluaran Lain-lain	0		
	b. Pemberian Piutang	0		
	b. Pembayaran Utang	0		
C.	SALDO PER 26 NOVEMBER	0		
	Kas di rekening khusus	0		
	Kas di bendahara	0		
	Barang	0		
	Tagihan Kepada:	0		
	Utang	0		

Sumber: Partai Keadilan Sejahtera (2024)

Jenis Pengeluaran	MA	IN	MM
Mengorganisasi aksi kampanye, termasuk transportasi	400 Jt	300 Jt	90 Jt
Pembelian suara (vote buying)	Tidak Ada	Tidak ada	40 Jt
Sumbangan/hadiah untuk komunitas (jalan,tenda/tratak, perbaikan jalan, wires)	160 Jt	110 Jt	750 Jt
Organisasi kampanye/ tim ses	160 Jt	130 Jt	100 Jt
Iklan kampanye	80 Jt	78 Jt	64 Jt
Konsultan Politik/survei	Tidak ada	Tidak da	Tidak ada
Aktivitas media sosial	19 Jt	Tidak Ada	Tidak ada
Saksi	50 Jt dan dibantu partai	70 Jt	35 Jt
Sembako/Bansos	250 Jt	310 Jt	110 Jt
Pengadaan baju, kaos, jaket	150 Jt	170 Jt	130 Jt
Dana kompensasi pada kandidat kalah pasca pemilu	400 Jt	350 Jt	65,2 Jt
Perkiraan Pembiayaan Politik	Rp 1.669.000.000	RP 1.518.000.000	Rp 1.384,2.000.000

Sumber : Partai Keadilan Sejahtera (2024)

Jenis Pengeluaran	NF	AF	SK
Pertemuan warga	380 Jt	270 Jt	100 Jt
Mengorganisasi aksi kampanye, termasuk transportasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pembelian suara (Vote Buying)	180 Jt	100 Jt	750 Jt
Sumbangan\hadiah untuk komunitas jalan tenda\ tratak, perbaikan jalan,wires)	120 Jt	200 Jt	220 Jt
Organisasi kampanye tim\tim ses	124 Jt	130 Jt	100 Jt
Iklan kampanye	75 Jt	90 Jt	40 Jt
Konsultan politik\survai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Aktivitas media sosial	15 Jt	20 Jt	25 Jt
Saksi	60 Jt	30 Jt	20 Jt
Sembako\ bansos	230 Jt	390 Jt	100 Jt
Pengadaan kaos, jaket	120 Jt	100 Jt	130 Jt
Dana kompensasi pada kandidat kalah pasca pemilu	300 Jt	120 Jt	87,6 Jt
Perkiraan Pembiayaan Politik	Rp 1.484.000.000	Rp 1.450.000.000	Rp 1.575.600.000

Sumber : Partai Persatuan Pembangunan

Penyusunan dan laporan penerimaan dan pengeluaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 32 PKPU 18 Tahun 2023 yaitu :

Ayat (1)

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik bersangkutan.

Ayat (2)

Dana Kampanye yang bersumber dari calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.

Ayat (3)

Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (!) huruf c berasal dari :

- a. Perseorangan;
- b. Kelompok;
- c. Perusahaan; dan / atau
- d. Badan usaha nonpemerintah.

Ayat (4)

Sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi informasi identitas yang jelas.

Ayat (5)

Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan keputusan KPU.

Jika mengacu pada besarnya dana kampanye yang digunakan dalam waktu kampanye yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00 menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari calon lembaga legislatif yang jadi pada Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah. Sedangkan dari Partai Keadilan Sejahtera dana kampanye yang di keluarkan Rp. 4.000.000.000,00

Selain itu, ada banyak jenis pengeluaran kampanye kandidat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih pada Pemilu 2024. Mulai dari kegiatan kampanye tertutup yang

dihadiri 50-100 orang, mengadakan perkumpulan satu RT bahkan RW di berbagai tempat, dan adapun sumbangan untuk komunitas (mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan masjid atau musholah, dan infrastruktur kesehatan maupun olahraga yang lebih membutuhkan). Membayar tim sukses, pembagian sembako, membayar saksi, bahkan sampai ke pembayaran uang kompensasi untuk para caleg yang kalah pasca pemilu.

Adapun untuk pembiayaan iklan kampanye baik di media baliho dan bailbort maupun media sosial relatif yang paling kecil. Selain itu, dari 6 kandidat yang menjadi subjek penelitian ini tidak ada yang menggunakan jasa konsultan politik dan survei politik dalam kampanye politik beliau di Pemilu 2024. Survei politik umumnya lebih banyak dilakukan oleh partai politik dari masing-masing dapil di Provinsi Jawa Tengah. Namun, tidak semua partai politik melakukan kegiatan survei politik dengan membayar lembaga survei yang profesional. Dari hasil penelitian yang saya dapat, saya hanya mendapatkan PKS yang telah melakukan survei politik menjelang kampanye pemilu 2024 di Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah pengeluaran dana kampanye politik dari masing-masing kadidat di PPP dan PKS pengeluaran terbesar untuk sumbangan barang, pertemuan warga, dan pengadan sembako. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah kondisi. Pertama, sebagian besar dari masing-masing kandidat PPP dan PKS pad kandidat petahana maju kembali dalam kontensasi di pemilu 2024. Para petahana ini oleh para kandidat yang pendatang baru dinilai telah memiliki dana aspirasi yang digunakan untuk membangun modal sosial. Misalnya, dalam konteks seperti H. Nurul Furqon , S.E,M.M. Dapil 3 (meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Demak) dari partai PPP sedangkan dari PKS seperti H. Muhammad Afif, Lc Dapil 1 Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, para petahana tersebut yang sudah bebrapa kali menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dan memiliki latar belakang sebagai ketua partai atau keturunan di lingkup pemerintahan pimpinan dewan yang memiliki anggran dana yang cukup besar, yakni mencapai 4 milyar.

Sedangkan seperti data yang saya dapet dari masing-masing kandidat petahan dengan dana pokir dari masing-masing kandisat telah diposisikan oleh para kandidat pendatang baru atau yang baru menyalon sebagai anggota DPRD Jawa Tengah sebagai ancaman besar bagi mereka di pencalonan pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah ini. Karena itu, para pendatang baru yang benar-benar ingin menang dalam Pemilu 2024 telah banyak mengeluarkan dana besar untuk kegiatan vote buying dengan tujuan mempengaruhi pilihan masyarakatnya.

Kedua, kegiatan pertemuan warga, pembangunan infratraktur, dan pembagian sembako dinilai oleh para kandidat, baik dari petahana maupun pendatang baru, sebagai salah satu strategi yang efektif untuk membangun ikatan anataran masyarakat dengan kandidat DPRD di masing- masing dapil Jawa Tengah. Enam kandidat yang menjadi subjek dari penelitian ini menyadari bahwa kampanye terbuka yang biasanya diadakan dilapangan atau kampanye akbar yang dinilai tidak efektif untu menarik simpati warga dan hanya menghabiskan uang yang cukup besar. Karena hal itu, di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 telah diadakan kampanye terbuka namun cukup satu atau du kali saja selebihnya lebih kampanye tertutup yang diselenggarakan di desa-desa atau kelurahan dari masing-masing dapil tersebut. Sejauh pengamatan saya kampanye terbuka di Jawa Tengah yang bersamaan dengan kampanye presiden namun membawa nama masing-masing partai tidak membawa nama pribadi perkandidat. Karena kampanye terbuka lebih menonjolkan kampanye calon presiden dan wakil presiden saja.

Kampanye yang dilakukan oleh kandidat masing-masing partai yang saya amati lebih sering melakukan kampanye engan cara bertemu dengan warga, memberi makanan, minuman, sembako, mengadakan pengajian umum serta pembangunan infrastruktur olahraga dan pembangunan tempat ibadah. Beragam bentuk bakti sosial yang dilakukan oleh para kandidat dari masing-masing partai. Dengan hal tersebut, dari masing-masing kandidat juga membagikan sembako karena melihat bahwasaya sembako adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah-tengah harga kebutuhan pokok semakinmeningkat karena adanya menuju pergantian pemerintahan atau Pemilu 2024.

Di Jawa Tengah secara umum kandidat mengatur anggaran kampanyenya secara mandiri. Menurut penelitian yang saya lakukan banyak caleg yang tidak mempunyai bendahara pribadi yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan aktivitas kampanye politik selama pemilu 2024 namun cukup dengan satu atau dua staffnya yang mendampingi dalam pekerjaanya dan cukup dengan bendahara dari masing-masing partainya. Selain itu para kandidiat juga banyak yang tidak memiliki administrasi pendanaan yang baik. Pada umumnya, mereka mencatat pengeluaran uang untuk membiayai pendanaan kampanye dalam sebuah kertas taupun catatan di alat elektronik lainnya. Hal itu juga tidak semua pengeluaran mereka tercatat. H Nurul Furqon, S.E,M.M. kandidat petahana dari PPP, mengatakan kepada sayaberkaitan hal ini:

“ Dalam kegiatan kampanye, di sejumlah tempat saya meberikan

sumbangan dalam berbagai hal. Ada yang meminta infrastruktur kesehatan(lapangan tenis), ada yang meminta pengaspalan jalan bahkan pembangunan tempat ibadah(Masjid), di setiap weekend saya juga kumpul-kumpul dengan komunitas yang saya ikuti yaitu komunitas Jeep Trail Kalijogo Demak, dan kebetulan daerah tersebut daerah kawasan saya. Pastinya adanya kegiatan tersebut saya mengeluarkan uang untuk mebeiyai kegiatan tersebut sekitar 600-900atau lebih. Saya kurang ingat berapa tepatnya karena hal-hal tersebut yang mengeluarkan uang tidak begitu banyak jarang saya catat, kecuali sumbangan yang notebenya mengeluarkan biaya yang cukup besar seperti pembuatan lapangan tenis dan lain sebagainya”(Wawancara, 22 Januari 2025).

Kandidat lain, M Ali Wafa dari PPP, menjelaskan kepada saya bahwa dia juga tidak memiliki bendahara yang mencatat seluruh pengeluaran pendanaan kampanye yang dia lakukan. Bahkan, M Ali Wafa juga mengaku ke saya bahwa ia tidak memiliki catatan yang sistematis terkait administrasi pendanaan kampanye. Kandidat M. Afif dari PKS, menjelaskan kepada saya bahwa dia juga tidak memiliki bendahara yang mencatat seluruh pengeluaran pendanaan kampanye yang dia lakukan. Bahkan Afif juga mengaku ke saya bahwa ia tidak meiliki catatan yang sistematis terkait administrasi pendanaan kampanye. Singkatnya, baik Dr Hj. Sholeh Kurniawati, Hj Ida Farida dan Much. Muchlis Ariston adala para kandidat yang tidak memiliki sistem administrasi pendanaan kampanye yang baik.

Secara umum kandidat sudah memulai melakukan kampanye dan mengeluarkan banyak uang untuk membangun dan mempertahankan popularitasnya di tengah-tengah masyarakat jauh sebelum kampanye pemilu 2024 di khususnya di Jawa Tengah. Misalnya Hj Ida Farida sebagai sekertaris PKS DPRD Jawa Tengah 2024-2029. Ia telah banyak melakukan kerja sosial yang berkaitan dengan program-program pada kebutuhan mendasar masyarakat terutama pada pembrdayaan perempuan dan keluarga, dan kebanyakan pembiayaan kegiatan tersebut dari uang pribadi dan juga dari bantuan sponsor. Demikian ini sebagaimana kutipan wawancara saya dengan Hj Ida Farida:

“Selama menjadi bagian dari sekertaris PKS DPRD Jawa Tengah, saya banyak melakukan kerja untuk masyarakat dan yang saya utamakan yang berkaitan dengan memberdayaan perempuan dan keluarga. Karena saya juga kebetulan anggota perempuan yang menjabat dua periode jadi saya juga sudah menempuh berbagai macam-macam kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat”

(Wawancara, 7 Februari 2025).

Selanjutnya dari M.Afif sebagai wakil Ketua DPRD Jawa Tengah sekaligus wakil ketua DPRD Kota Semarang periode 2019-2024, ia telah banyak melakukan kerja-kerja sosial untuk membantu masyarakat yang menjadi konstituennya, dan kebanyakan pembiayaan kegiatan tersebut tidak hanya dari dana pribadi namun juga dari sponsor. Demikian ini sebagai kutipan wawancara saya dengan M. Afif berikut :

“ Selama menjadi bagian dari pimpinan DPRD Jawa Tengah bahkan DPRD Kota Semarang, saya banyak melakukan kerja-kerja sosial membantu masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga hubungan baik saya dengan para konstituen. Supaya ada ikatan batin antara saya dan masyarakat, selebihnya pada kader PKS yang pada masa pemilu telah membantu saya menjadi anggota dewan. Kegiatan bakti sosial ini lebih saya sering lakukan selama satu tahun terakhir pada saat saya diberi amanah menjadi Ketua DPW PKS di Jawa Tengah untuk periode 2023-2025. Kegiatan ini seperti melakukan bakti sosial kerjasama dengan Telkomsel untuk melakukan santunan anak yatim, sunatan masal. Selain itu saya juga mendirikan yayasan Al-Wafa sejak tahun 1999, disamping hal tersebut saya juga membuat proposal ke masjid-masjid besar untuk membantu dalam mendistribusikan zakat fitrah di saat bulan Romadhon kepada keluarga yang notabnya kurang mampu yang ada di Dapil wilayah saya. Selan itu saya juga pernah membantu pembangunan masjid pada tahun 2023 membantu 2 masjid untuk mendapatkan akses dana sebesar kurang lebih Rp 80 juta untuk setiap masjid”(Wawancara, 7 Februari 2025).

Dalam wawancara saya dengan M. Afif pasca pemilu2024, M.Afif juga menjelaskan bahwa :

“ untuk mengikat hubungan sosial yang baik, saya sendiri selalu memberikan bingkisan kepada tim sukses saya, masyarakat, dan Kader PKS yang ada di Dapil saya sendiri. Mere dari tim sukses bahkan masyarakat yang memilih saya mayoritas pendukung sayapada pemilu tahun 2019”(Wawancara, 7 Februari 2025).

Berbeda dengan cara Hj. Ida Farida dan Much. Muchlis Ariston dalam melakukan kegiatan sosial ke masyarakat, namun tidak berbeda jauh karena notebenya masih satu fraksi

tidak meninggalkan bakti sosial dari kegiatan sumbang asih pada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Kegiatan itu seperti melakukan kegiatan sosial dalam kegiatan pengajian, kegiatan besar atau hari besar Islam di masjid dan sumbangan untuk pendukung yang mendukungnya di masing-masing dapilnya. Selain itu, hasil dari penelitian yang sudah dilakukan Ida Farida dari kegiatan sosialnya lebih mengutamakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Sedangkan Dr. Hj. Sholehah Kurniawati, kandidat petahana dari PPP yang kembali maju sebagai anggota DPRD Kota Semarang di pemilu 2024, tidak banyak melakukan pengeluarannya guna menjaga popularitasnya dari PPP. Ia telah menjelaskan ke saya pada saat wawancara bahwa selama dua tahun terakhir dia banyak mengeluarkan uang untuk membantu sejumlah organisasi masyarakat ataupun sosial dan ia juga lebih mengutamakan bakti sosialnya dalam bentuk pemberian fasilitas kesehatannya yang notabene ia juga tau tentang kesehatan yang lebih intens.

5.2 Efektivitas Penggunaan Dana Kampanye

Pemanfaatan sumber daya negara dalam kegiatan kampanye di Jawa Tengah, secara umum, lebih banyak dinikmati oleh kandidat petahana dibandingkan dengan kandidat pendatang baru. Nurul Furqon, dan Sholeha Kurniawati adalah kandidat yang menjadi subjek penelitian ini mengaku bahwa mereka sebagai anggota dewan memiliki jatah dana aspirasi setiap tahun sebesar Rp 1,5 milyar sedangkan Sholeha Kurniawati juga mendapatkan 1,5 milyar, kebanyakan dana aspirasi mereka sebanyak 60 persen telah didistribusikan kepada konstituen mereka yang memilih pada pemilu 2019, sedangkan 40 persennya telah didistribusikan kepada komunitas masyarakat yang dulu tidak memilih dengan harapan pada pemilu 2024 akan memberikan dukungan.

Dari keenam kandidat dan 4 kandidat petahana yang memanfaatkan anggaran negara dalam bentuk dan apokir untuk membangun political linkage dengan masyarakat dan mencari dukungan pada masa kampanye Pemilu 2024 tersebut, hanya M. Afif dan Nurul Furqon yang merasa diuntungkan dengan adanya dana aspirasi. Dengan adanya dana aspirasi 1,5-3 milyar setiap tahun. Nurul Furqon dan Afif mendistribusikan 15-20 kegiatan pembangunan fisik pembangunan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. Agar

dana aspirasi memiliki efek politik dalam membangun ikatan batin antara kandidat dengan masyarakat. Afif dan Furqon telah meminta masyarakatnya di dapilnya masing-masing mengadakan tasyakuran khususnya di acara pengajian di masing-masing dapil mereka. Afif dan Furqon mengaku bahwa dengan cara hal tersebut mengaku bahwa tanpa politik uang, warga yang mendapatkan pembangunan dari dana aspirasi banyak yang memilihdirinya dan saling menguntungkan di tahun 2024. Furqon dan Afif merasa dirinya diuntungkan dengan adanya dana aspirasi (Wawancara, Afif, 7 Februari 2025 dan wawancara Furqon, 22 Januari 2025).

Penelitian ini tidak menemukan ada kandidat yang menyeleggarakan aksi kampanye terbuka yang melibatkan masa dalam jumlah besar. Keenam kandidat yang menjadi subjek penelitian ini mengaku bahwa aksi kampanye terbuka yang melibatkan juru kampanye atau mendatangkan artis terkenal untuk menghibur hanya menghabiskan uang saja, dan juga disisilain tidak memiliki dampak bagi peningkatan suara kandidat maupun partai politik maupun kandidat yang mengadakan kegiatan kampanye terbuka, rapat umum, ataupun pawai besar-besaran menggunakan kendaraan sepeda motor bahkan kendaraan roda 4. Kegiatan kampanye terbuka atau dalam rapat umum di Jawa Tengah hanya dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Dimana ketiga calon dan wakil presiden telah mengadakan kampanye terbuka secara bergantian di lapangan yang ada di simpang lima Kota Semarang. Dalam kegiatan kampanye ini, saya pernah melakukan observasi satu kali dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam kegiatan kampanye ini tidak hanya mendatangkan para juru bicara nasional dan mendatangkan artis Ibu Kota dan para tokoh Partainya. Dalam kegiatan ini para caleg partai yang diusung oleh pasangan calon dan wakil presiden diwajibkan mengarahkan massa untuk datang di acara kampanye dan memberikan uang transport.

Keenam kandidat yang menjadi subjek penelitian ini secara umum menggunakan sejumlah baliho besar yang telah dipasang di sejumlah titik jalan raya dan ratusan baliho kecil untuk mengikhlaskan diri mereka kepada masyarakat pada masa kampanye pemilu 2024. Kegiatan kampanye terbatas dalam bentuk pertemuan warga atau pertemuan lingkungan terbatas lingkup RT dan komunitas warga seperti PKK adalah aktivitas kampanye yang dilakukan oleh semua kandidat menjadi penelitian ini. Dalam kegiatan ini, umumnya kandidat datang sendiri ke tempat daerah dapilnya masing-masing atau mengajak orang tim sukses untuk datang di pertemuan warga dalam kegiatan pengembangan seni bahkan sosialisasi tentang kegiatan sosial.

Kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan warga ini , umumnya tidak ada orasi kampanye yang panjang oleh kandidat. Kandidat sendiri hanya melakukan pengenalan ,

menjelaskan agenda kedatangan dalam rangka pencalonan mereka sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dari dapilnya masing-masing. Setelah itu, kandidat menanyakan ke warga apa yang mereka inginkan dari sang kandidat jika terpilih, dan apa yang bisa mereka bantu sebelum hari pemilihan berlangsung. Dan tidak tertinggal para kandidat di acara kampanye pertemuan warga ini membagi baju seragam, bantuan sembako, pendidikan maupun kesehatan. Dalam kegiatan kampanye seperti ini selalu ada minum, snack ringan dan makan-makanan yang semuanya telah di tanggung oleh masing-masing kandidat baik dari PPP dan PKS. Selain kegiatan pertemuan warga di atas, kegiatan kampanye pemilu 2024 yang paling umum dilakukan oleh kandidat adalah mengadakan sosialisasi bersama warga dalam jangkauan per RT atau komunitas organisasi masyarakat.

Secara umum para kandidat membiayai kegiatan kampanyenya dari uang pribadi yang ber sumber dari aset pribadi atau suami ataupun istrinya. Setiap kandidat memiliki anggaran yang beragam untuk pendanaan kampanye di Pemilu 2024 berikut. Berikut rician sumber pendanaan dari masing-masing kandidat baik dari PPP dan PKS:

Tabel 5. 3 Sumber Pendanaan Kampanye

No	Nama Kandidat	Penerimaan		Pengeluaran		Saldo Barang
		Barang	Jasa	Sumbangan Barang	Sumbangan Jasa	
1.	M. Afif	401.129.499	183.250.000	306.129.499	213.250.000	95.000.000
2.	Ida Nurul	88.837.500	1.500.000	88.837.500	1.500.000	0
3.	M.Muchlis Ariston	208.746.000	41.255.000	189.646.000	41.255.000	19.100.000
4.	Nurul Furqon	400.100.478	173.240.000	303.125.478	210.150.000	92.000.000
5.	Sholeha Kurniawati	300.110.329	163.120.000	202.206.100	201.101.170	73.000.000
6.	M. Ali Wafa	206.372.000	31.260.000	170.125.000	46.355.000	18.200.000

Sumber : PPP dan PKS 2025

Kandidat Pertama, M.Afif, sebagai seorang politisi senior dan sekarang kebetulan menjadi Ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Tengah sekaligus DPRD di Kota Semarang. Tidak kesulitan dalam membiayai kegiatan kampanyenya. Ia telah menjelaskan kepada saya bahwa biaya kampanye di pemilu 2024 sudah ia siapkan dari uang tabungan selama 4 tahun menjadi anggota dewan. Selain itu Ia juga mengaku mendapat bantuan sumbangan atau suntikan dana dari seseorang teman yang bekerja di kanto keuangan. Bantuan ini dikatakan sebagai bentuk imbalan jasa yang Ia lakukan selama 10 tahun sebelumnya. Yang dimana M.Afif berhasil membantu seorang istri teman yang berprofesi sebagai seorang dokter PNS untuk mutasi kerja dari luar Jawa ke Kota Semarang. Ia mengaku jumlah uang sebesar 40 juta untuk pengadaan iklan di billboard dan baliho untuk membiayai kegiatan kampanye dan pasca kampanye di Pemilu 2024 Afif telah mengeluarkan uang sekitar Rp 4 miliar. Dana kampanye ini menurut Afif tidak terlalu besar bila dibandingkan pengeluaran dana kampanye kandidat umumnya yang memang merebutkan kursi DPRD Jawa Tengah, Ia mengatakan juga kebanyakan teman saya mengeluarkan hampir Rp 5 miliar.

Kandidat Ida Nurul Farida dan Sholehah Kurniawati kandidat perempuan yang sudah menjabat anggota DPRD dua periode dan dari PPP dan PKS, dari masing-masing kandidat tersebut telah mengeluarkan dana kampanye sekitar Rp 2 miliar. Dana ini masih dibawah dana yang telah ia siapkan untuk kampanye pemilu 2024 ini sebesar 2,8 miliar. Dana sebesar itu sebelumnya dua kandidat tersebut yang sudah mengumpulkan sebelum menjelang pemilu 2024 yang notebenya dari Sholehah Kurniawati profesi sebagai Dokter dan mempunyai klinik kesehatan dirumahnya di daerah Kab. Serang.

Kandidat keempat, Muchlis Ariston dari PKS telah mengeluarkan dana kampanye dan pasca kampanye sekitar Rp 3,1 miliar. Muchlis adalah seorang yang pernah aktif di DPD PKS Pekalongan dan menjadi bendahara umum, sekertaris DPD PKS Kota Pekalongan, dan menjadi ketua BPD PKS Jawa Tengah Dapil 13. Ia menjelaskan kepada saya bahwa uang yang digunakan untuk kampanye adalah hasil uang tabungan pribadi miliknya.

Kandidat Kelima, Nurul Furqon dari PPP, yang dimana Ia politisi di PPP dan sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Tengah 2 periode sebelum Pemilu 2024 berlangsung. Ia menjabat DPRD Jawa Tengah periode 2018-2019 dan 2019-2021. Selanjutnya, di Pemilu 2024 ini Ia juga terpilih dan diamanati lagi menjadi DPRD Jawa Tengah. Ia telah mengeluarkan dana kampanye dan pasca kampanye sekitar Rp 3 miliar, dan Ia mengaku bahwasanya dana kampanye dari tabungan pribadi tanpa sponsor dari luar sedikitpun karena

notabnya Ia juga dari keluarga politisi dan sudah menjabat sebelumnya sehingga sudah mempunyai nama.

Kandidat Keenam, M Ali Wafa dari PPP , Ia adalah anggota baru yang menjabat di PKS dan pertama kali nyalon di DPRD Jawa Tengah, kebetulan Ia kebagian di Dapil 4 Jawa Tengah yaitu daerah pemilih Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati dengan perolehan suara 708.101 suara. Ia mengatakan ke saya bahwasanya dana kampanye telah mengeluarkan sekitar Rp 3 miliar dan dana tersebut lebih banyak di salurkan di pondok pesantren kebetulan Ia mempunyai lingkungan yang notabnya berada di lingkup santri.

Info penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwasanya data dari hasil wawancara dengan seorang kandidat bahwasanya banyak kandidat DPRD partai yang mempunyai gaji tambahan atau usaha-usaha lainnya yang dapat menambah fee, sehingga fee tersebut dapat digunakan untuk suntikan tambahan dana dalam kampanye seperti halnya dalam pembangunan di dapilnya masing-masing (Wawancara, 7 Februari 2025)

BAB VI

KONDISI PENENTUAN POLA PEMBIAYAAN DARI MASING-MASING KANDIDAT

6.1 Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Pola Pembiayaan

Peraturan yang mengatur pendanaan dana kampanye di Indonesia merupakan aspek penting dalam proses pemilu, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Namun meskipun telah ada upaya yang signifikan untuk mengatur pendanaan dana kampanye, masih banyak tantangan yang telah dihadapi. Tantangan-tantangan ini telah berakar pada keterbatasan undang-undang yang ada dan kelemahan dalam penegakannya. Kondisi saat ini, banyak isu-isu yang mengatakan tingginya pembiayaan kampanye, terutama pada pemilu legislatif 2024 saat ini. Regulasi dana kampanye di Indonesia telah mengalami perubahan bahwasanya sejak transisi menuju demokrasi pada tahun 1998.

Namun dengan adanya hal tersebut, banyak jalur tidak ilegal, para kandidat sering menggunakan proxy atau pihak ketiga untuk menyalurkan dana kampanyenya, yang secara efektif telah melewati batas hukum yang ada. Selain itu, kurangnya transparansi dalam asal-usul sumbangan kampanye semakin mempersulit penegakan hukum sehingga laporan yang mengidentifikasi bahwa sebagian besar pendanaan kampanye berasal dari sumber yang tidak dapat dilacak, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi keterlibatan dana ilegal (Berenshot, 2019).

Ketentuan selanjutnya adalah keharusan bagi para kandidat dan partai politik untuk melaporkan pengeluaran kampanye mereka (masing-masing kandidat). Laporan harus diserahkan ke KPU dan merinci semua sumber pendanaan dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan dan untuk kegiatan apa saja. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan memungkinkan pengawasan publik terhadap pembiayaan kampanye. Namun, hal seperti ini kepatuhannya seringkali di biarkan begitu saja. Kandidat sering kali tidak melaporkan pengeluaran mereka atau tidak mengungkapkan seberapa besar transaksi tertentu sama sekali. Dalam studi (Sherlock, 2019) banyak laporan keuangan yang diserahkan kepada KPU tidak memiliki rincian yang cukup, sehingga sulit untuk memverifikasikan keakuratannya.

Masalah selanjutnya adalah ketergantungan pada pelaporan mandiri oleh kandidat dan partai politik. Sistem yang ada saat ini menempatkan beban pembuktian pada para kandidat untuk mengungkapkan keuangan mereka dan verifikasi mandiri dengan badan-badan pengawas. Hal ini dapat mengakibatkan peluang manipulasi dan ketidakpatuhan karena tidak banyak mekanisme yang mengaudit laporan keuangan atau menyelidiki ketidaksesuaian. Bahkan ketika ada

pelanggaran hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak cukup untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Selain hal tersebut campur tangan politik juga merusak keefektifitas penegakan hukum. Badan –badan pngaturan bisa tudnuk pada aktor politisi yang berkuasa yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka.

Pembelian suara juga menjadi masalah lain yang sering diabaikan dalam peraturan dana kampanye. Meskipun undang-undang secara eksplisit melarang penggunaan uang atau hadiah untuk mempengaruhi pemilih, praktik praktik ini tetap meluas, terutama di daerah pedesaan di mana jaringan tradidonal masih kuat. Para kandidat dapat mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk kegiatan pembelian suara, tetapi pengeluaran ini jarang terjermin dalam laporan keuangan resmi (Aspinall & Berenshot, 2019).

Tingginya biaya pembiayaan kampanye di Indonesia sangat terkait dengan dinamika sosialpolitik negara ini, yang mempengaruhi strategi, prioritas, dan pengeluaran kandidat dan partai politik. Faktor-faktor sosiopolitik mengacu pada konteks yang lebih luas dan bersaing pada persaingan politik, norma-norma budaya, dan perilaku pemilih. Eleman-eleman ini telah menciptakan lanskap di mana pendanaan kampanye tidak hanya menjadi alat untuk keberhasilan pemilu tetapi juga merupakan cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh proses demokrasi di Indonesia. Bagian ini telah membahas faktor –faktor yang mempengaruhi pola pembiayaan kampanye. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan kampanye mahal yaitu adanya multi-partai di Indonesia`

Selain itu, faktor sosial yang dapat melibatkan terhadap pola pembiayaan yang tinggi niaya kampanye di Indonesia terutama di daerah pedesaan dan semi perkotaan, pemilihan umum tidak hanya melihat sebagai konteks politik saja namun juga sebagai kesempatan untuk mendapat keuntungan materi secara langsung. Para kandidat seringkali merasa terdorong untuk mebagikan uang tunai, hadiah atau insentif untuk mengamankan loyalitas pemilih terutama di daerah pemilihan yang kompetitif di mana selisih suara yang kecil dapat menentukan hasil pemilu.

Faktor lain yang berperan penting terhadap pembiayaan kampanye adalahverkaitan dengan sistem Pemeilihan Umum Indonesia. Meskipun sistem representasi proposional terbuka telah mendorong kompetisi individu, desain lembaga politik yang lebih luas memberikan tekanan aignifikan pada kandidat untuk mendapatkan sumber daya secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keungan sebagian besar partai, yang sangat bergantung pada donasi swasta dan subsidi negara yang tidak cukup untuk menutupi biaya kampanye modern (Santoso, 2023).

Selain itu, kurangnya mekanisme pembiayaan publik yang kuat dalam memperburuk masalah meskipun dari beberapa dana publik dialokasikan untuk partai politik berdasarkan kinerja mereka, dana ini lebih diutamakan untuk dana organisasi dan tidak sering digunakan untuk mendukung kampanye individu. Hal ini memaksakan para masing-masing kandidat di masing-masing partai untuk bergantung pada kekayaan pribadi atau donor eksternal, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap pengaruh kepentingan pribadi. Biaya transportasi, misalnya, merupakan biaya yang besar mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan kepulauan. Kandidat yang mencalonkan diri di daerah pemilihan pedesaan atau terpencil harus melakukan perjalanan yang jauh untuk menjangkau pemilih di desa-desa dan pulau-pulau yang jauh.

Demikian pula dari biaya bahan kampanye seperti, spanduk, poster, dan selebaran telah meningkat karena inflasi dan kenaikan biaya produksi, hal ini juga disebabkan karena kemajuan teknologi sehingga percetakan telah memungkinkan para kandidat harus memproduksi materi yang berkualitas tinggi, tetapi kampanye yang dipersonalisasi dan lokal yang sesuai dengan demografi yang ada. Pemilih tentu telah meningkatkan volume dan variasi materi yang dibutuhkan, sehingga semakin meningkatkan biaya (Aspinal & Sukmajati, 2016).

Faktor ekonomi penting lainnya yang berkontribusi terhadap biaya kampanye adalah tidak bisa mengatur pendanaan partai politik. Di Indonesia sendiri partai politik menerima subsidi terbatas dari negara, yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya terkait kampanye modern. Sistem saat ini karena telah mengalokasikan dana publik kepada partai berdasarkan jumlah suara kursi atau suarayang mereka peroleh pada pemilu 2024 saat itu. Namun pada dasarnya, subsidi yang diberikan sering kali berbentuk nominal dan tidak memberikan dukungan yang berarti bagi para kandidat, terutama di tingkat akarnya.

Selain itu, kemampuan keuangan partai politik juga menghambat terkait pengalihan dana kampanye terkait tanggung jawab pendanaan kampanye kepada kandidat perseorangan. Dinamika seperti ini banyak dilakukan pada saat pemilihan lembaga legislatif pada pemilu 2024 saat itu. Secara efektivitas banyak yang memprivasiakan terkait pembiayaan kampanye sehingga memaksakan kandidat untuk mengandalkan kekayaan pribadi atau sumbangan dari pihak lain (eksternal). Ketidakcukupan pendanaan publik dan partai telah menyebabkan peningkatan kandidat dalam ketergantungan pembiayaan dari pendanaan swasta dan informal yang secara signifikan membentuk dinamika ekonomi pembiayaan kampanye di Indonesia. Para kandidat seringkali mencari dukungan keuangan dari perusahaan, individu kaya, dan jaringan informal sehingga menciptakan sistem pendanaan kampanye yang sangat transaksional.

Ketergantungan itu pada pihak swasta atau eksternal dapat menimbulkan beberapa tantangan ekonomi yang dimana kandidat harus menginvestasikan waktu untuk membina dan menjalin hubungan baik dengan pendonor dan para donatur sering kali mengharapkan bantuan politik atau kesuksesan ke kontrak pemerintahan. Sumber pendanaan Informal dari dana pribadi, saudara, kerabat, anak, istri juga memiliki peran penting dalam pembiayaan kampanye. Namun, disisi lain pastinya keluarga juga berharap ada timbal baliknya entah berbentuk lapangan pekerjaan yang akan datang untuk anak cucunya nanti atau akses-akses lainnya. Para kandidat sering kali mengandalkan para elit politik elit lokal untuk mendukung dan mengamankan suaranya, sehingga untuk gantinya, kandidat diharapkan ada pemberian finansial ataupun janji-janji untuk di masa depan.

Faktor budaya juga mengakibatkan pembiayaan kampanye yang dapat mendorong peningkatan biaya kampanye di Indonesia adalah harapan bahwa kandidat akan secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada acara-acara lokal yang ada di masing-masing daerah para kandidat.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pembiayaan kampanye politik caleg partai pada pemilu 2024 di Jawa Tengah studi kasus PPP dan PKS dapat disimpulkan sebagai berikut: Perbedaan pola pembiayaan kampanye kandidat PPP dan PKS dalam segi penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran bahwa pembiayaan kampanye para kandidat legislatif di Jawa Tengah pada pemilu 2024 semakin mahal bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagian besar kandidat yang serius ingin merebutkan kursi untuk dapat memenangkan kursi DPRD Jawa Tengah parakandidat banyak yang menggunakan uang untuk mempengaruhi suaranya. Namun para kandidat mengatakan untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan, kesehatan bahkan sembako. Maka dari itu seperti tidak terlihat menggunakan uang untuk mendapatkan suara karena pintar memberikan celah lain untuk memberikan sesuatu untuk masyarakat yang dibutuhkannya di masing-masing dapil tersebut.

Dalam kondisi yang menentukan pola pembiayaan yang dilakukan PPP dan PKS pada pemilu 2024 di Jawa Tengah bahwa, penggunaan uang untuk mendapatkan suara banyak pada pemilu 2024 di Jawa Tengah seolah-olah sudah bukan tindakan yang tidak biasa yang dilakukan para kandidat hal tersebut sudah merupakan tindakan yang biasa untuk dilakukan para kandidat dalam pemilu 2024 ini. Sejumlah kandidat juga terbuka dalam sebuah forum yang dilakukan di dapilnya masing-masing dan menyampaikan visi-misi maupun kinerja kedepannya seperti apa dan menanwarkan masyarakat apa yang dibutuhkan di tempatnya. Namun, disisilain kandidat tersebut memberikan amplop yang berisikan uang Rp 100 ribu dan dimintai absen sebelum acar dimulai (Observasi, 10 Februari 2024).

Di awal masa-masa kampanye pemilu 2024, keenam kandidat yang saya wawancarai telah optimis memenangkan kursi DPRD Jawa Tengah, yang 4 kandidat notabnya sudah pernah menjawab di DPRD Jawa Tengah pada periode sebelumnya, sehingga sudah mempunyai suara untuk kelanjutan pemilu 2024 di Jawa Tengah saat itu. Maka dari itu pembiayaan kampanye peneliti melihat dari profil pendanaan bahwasannya lebih dominan sumber pendanaan dari dana pribadi atau pasangan kandidat, mereka telah membiayai kegiatan kampanye dengan uang yang telah dikumpulkan sendiri dan dibantu uang pasangannya baik istrinya maupun suaminya sendiri.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang bisa peneliti simpulkan sebagai dasar pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye sehingga partai politik agar bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye terutama PPP dan PKS. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi ketentuan hukum saja tetapi juga dapat menjaga integritas serta membangun kepercayaan publik terkait proses demokrasi. Pengawasan yang lebih ketat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat memperkuat sistem pembiayaan yang bersih dan adil.
2. Peningkatan terkait partisipasi donatur yang bertanggung jawab sebagai strategi pembiayaan kampanye, disarankan agar partai-partai Islam seperti PPP dan PKS melibatkan lebih banyak donatur yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap penguatan demokrasi dan nilai-nilai Islam. Hal tersebut keterlibatan donatur tidak hanya bersifat finansial. Namun, harus didasari oleh niat untuk mendorong pencapaian sosial dan politik yang lebih besar ataupun semata untuk kepentingan sesaat.
3. Pendidikan politik uang pemilu, sebagai upaya keberhasilan kampanye yang adil perlu adanya program pendidikan politik lebih intensif untuk pemilu. Hal ini tidak hanya mencakup terkait visi dan misi partai, tetapi juga mengenai pentingnya memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang jelas dan pengelolaan dana kampanye secara transparansi.

Harapan penulis kedepan pembiayaan kampanye politik yang adil dan transparansi dapat menjadi tonggak bagi terciptanya sistem pemilu yang lebih sehat dan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana, dkk. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta Pusat:
- Ashsyarofi, H. L. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020. *JATISWARA*, 36(1), 49-61.
- Aspinall, E. & Berensehot, W. (2019). *Democracy for Sale: Election, Clientelism, and the State in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- Brenshot, W., & Mulder, P. (2019). Explaining regional variation in local governance: Clientelism and statedependency in Indonesia. *Word Development*, 122, 233-244
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (2008). Teori-teori ekonomi politik. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Chandranegara, I. S., Bakhri, S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 30-54.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196-211.
- Crouch, C. (2004). *Post-Democracy* (Cambridge: Polity). Crouch, Colin (2011) *The Strange Non-Death of Neo*. dalam Pemilu. Jurnal Resolusi.
- Dahl, R. A. (2008). *Democracy and its Critics*. Yale university press.
- Dinda, R. P. (2024). *kegagalan partai demokrat dalam melakukan pembentukan koalisi pada pilkadakota bukittinggi tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Doktor UIN, 2008).
- Fatimah, S. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002).
- Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on politics*, 12(3), 564-581.
- Hamajen, S., Setiawan, A., & Andriyani, L. (2023). Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik-Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 4(1), 7-20.
- Handika, R., & Azmi, A. (2020). Marketing politik calon legislatif generasi milenial. *Journal of Civic Education*, 3(1), 61-73.
- Hannum, E. Strategi Kampanye Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014.
- Hannum, E. Strategi Kampanye Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014.
- Harakatuna, 2006).

- Harvey, D. (2013). The enigma of capital and the crisis of capitalism. *Estado & comunes*, 1(1).
- Harvey, D. (2018). *A companion to Marx's Capital: The complete edition*. Verso Books.
- Haryanto, D. D. C., & Lop, Y. H. L. Pembiayaan Kampanye Calon Usungan Partai Politik Di Pilkada: Kasus Pilkada Kota Dan Kabupaten Madiun 2018. *di Indonesia*, 185.
- Haryanto, D. D. C., & Lop, Y. H. L. Pembiayaan Kampanye Calon Usungan Partai Politik Di Pilkada: Kasus Pilkada Kota Dan Kabupaten Madiun 2018. *di Indonesia*, 185.
- Herdiansah, A. G. (2017). Pragmatisme partai Islam di Indonesia: pendekatan tindakan sosial. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 152-167.
- Hermanto, R. (2020). Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-23.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375-395.
- Indonesia (Bandung: Harakatuna, 2006).
- Jurdi, F. (2020). *Penghantar Hukum Partai Politik*. Prenada Media.
- Kang, D.C. (2002). *Crony Capitalism: Corruption and development in South Korea and the Philippines*. Cambridge university press.
- Khan, M.H., & Jomo, K.S. (2000). *Rents, rents-seeking and economic development: Theory and evidence in Asia*. Cambridge University Press.
- Kusuma Dewi, N. (2011). *komunikasi internal birokrasi (studi komunikasi politik incumbent dalam pilkada grobogan tahun 2011)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Kusuma Dewi, N. (2011). *komunikasi internal birokrasi (studi komunikasi politik incumbent dalam pilkada grobogan tahun 2011)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Lesmana, C., Suryadi, K., & Anggraeni, L. (2021). Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Publisitas*, 8(1), 11-18.
- Maranda, A. T. (2019). *ekonomi politik di aras lokal (studi tentang pengelolaan badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa imbanagara raya)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Maranda, A. T. (2019). *ekonomi politik di aras lokal (studi tentang pengelolaan badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa imbanagara raya)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Marx, K. (2018). *Das kapital*. e-artnow.
- Minan, A. (2018). Partai Politik, Sistem Proporsional Terbuka, dan Pembiayaan Kampanye Pada Pileg 2014. *M. Sukmajati, & A. Perdana, Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, 47-72.
- Mubtadi, N. A., & Arifin, S. (2020). Analisis Dana Kampanye Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Serentak 2019. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 141-146.
- Muhammad Ansor, *Asas Islam dan Artikulasi Politik Partai Islam: Studi*
- Novriansyah, M. F. (2019). *strategi pendanaan kampanye partai politik untuk kemenangan calon legislatif pada pemilihan umum (Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)*.

- Pateman, J. (2020). VI Lenin on democracy. *International Critical Thought*, 10(4), 535-558.
- Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Perbandingan Terhadap PPP, PBB dan PKS (Jakarta: Tesis Magister UIN, 2004).
- Perdana, dkk. (2018). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta Pusat: Badan
- Pontoh, C. R. S. (2013). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan psak no 45 pada gereja bzl. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontempore, (Jakarta: Teraju
- Priowidodo, G., Indrayani, I. I., Gunawan, S., & Sari, Y. D. (2018). Pengambilan Keputusan dan Strategi Pemasaran Politik. *Pengambilan Keputusan dan Strategi Pemasaran Politik*.
- Purwosusanto, H. (2011). Komunikasi pemasaran politik partai Islam: studi kritis strategi PKS dalam pemilu legislatif.
- Purwosusanto, H. Komunikasi politik partai islam dan partai nasionalis: studi komparatif strategi kampanye politik pks dan pdi perjuangan dalam pemilu legislatif 2019.
- S. Sagap, Piagam Madinah Dalam Perspektif PKS (Jakarta: Disertasi
- Sadikin, U. H. (2016). Menyerentakan pemilu, memusatkan anggaran pilkada. *Pemilu Demokrasi*, 21.
- Santoso, A. (2023). The Role of Digital Media in Indonesia Elections. Bandung: Electoral Studies Journal, 12(3), 43-58
- Sasmita, E., Sokarina, A., & Mariadi, Y. (2022). Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Teori Ekonomi Politik. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 9-19.
- Sudibyo, A. (2004). *Ekonomi politik media penyiaran*. LKIS Pelangi Aksara.
- Sukmajati, M., & Disyacitta, F. (2019). Pendanaan Kampanye Di Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 75-95.
- Sukmajati, M., & Perdana, A. Bab 1 Pendahuluan: Pembiayaan Pemilu di Indonesia. *di Indonesia*, 1.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37-46.
- Taniady, V. (2021). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 91-104.
- WATI, D. G. (2019). *koalisi partai islam dalam pemilihan kepala daerah mesuji tahun 2017 (studi tentang strategi partai keadilan sejahtera)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3).
- Widiptya, G. P., & Utomo, S. (2017). Analisis kemenangan calon independen pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto dalam Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2015. *Journal*

- of Politic and Government Studies*, 6(2), 201-210.
- Widiptya, G. P., & Utomo, S. (2017). Analisis kemenangan calon independen pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto dalam Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 201-210.
- Winters, J. A., & Page, B. I. (2009). Oligarchy in the United States?. *Perspectives on politics*, 7(4), 731-751.
- Witianti, S., Nazsir, N., Bainus, A., Rahmatunnisa, M., & Azmi, F. (2021). proses rekrutmen dan seleksi kandidat di internal pdi perjuangan pada pilkada cimahi tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 6(2).
- Yaqin, M. A., & Wardani, S. B. E. (2021). Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 52-75.
- Yunus, N. R. (2016). Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 245-260.
- Yusuf, A., & Hertanto, H. (2023). Problematika Ketidakpatuhan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. *Tapis Jurnal Penelitian Ilmiah*, 7(1), 78-86.

Dokumentasi



Foto bersama H. Muhammad Afif, Lc(Ketua PKS)



Foto bersama Much.Muchlis S.T



Foto bersama Anggota PKS Hj Ida Farida, M.Pd



Foto bersama ke 3 Anggota PKS



Foto bersama Anggota PPP M. Ali Wafa



Foto bersama Anggota PPP Dr. Hj Sholeha Kurniawati



Foto bersama H. Nurul Furqon, S.E.M.M

CURICULUM VITAE



Nama : Iik Hikmahwati
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Oktober 2002
Nama Orang Tua : Sukarman dan Siti Robingah
Alamat Rumah : Desa Sidoagung, Rt 03 Rw 07 Kecamatan
Sruweng Kabupaten Kebumen
Nomor HP/WA : 081994880624
Email : iikhikmahwati123@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Tunas Bangsa
2. SD N 2 Sidoagung
3. SMP N 1 Karanganyar
4. SMA N 1 Pejagoan

RIWAYAT ORGANISASI

1. UKK MENWA (2022-Sekarang)
2. ORDA IMAKE (2022-2023 KOMINFO)

